



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 100.3.14 / 513 / 01.3/2024

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
KABUPATEN SRAGEN DALAM *E-WALIDATA* SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

BUPATI SRAGEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada *e-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Sragen Dalam *E-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 perihal Implementasi SIPD;

2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Sragen Dalam *E-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Sragen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen;
3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 100.3.14 / 513 /01.3/2024
TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK
SEKTORAL DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DALAM *E-WALIDATA* SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2024

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM
E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

Bidang Urusan : Sekretariat DPRD

NO.	KODE DSSD	URAIAN	SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
1	4.02.000001	Dokumentasi DPRD	Dokumen	0
2	4.02.000002	Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	N/A
3	4.02.000003	Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	45
4	4.02.000004	Publikasi DPRD	Dokumen	4
5	4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen	12
6	4.02.000006	Situs resmi dan saluran publikasi DPRD	Dokumen	7
7	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	11
8	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	11
9	4.02.000009	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3
10	4.02.000010	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	3
11	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1
12	4.02.000012	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	36
13	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1
14	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1
15	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1
1	2	3	4	5
16	4.02.000016	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1
17	4.02.000017	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2

1	2	3	4	5
18	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1
19	4.02.000019	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1
20	4.02.000020	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1
21	4.02.000021	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1
22	4.02.000022	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1
23	4.02.000023	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1
24	4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1
25	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1
26	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1
27	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	N/A
28	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6
29	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	17
30	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6
31	4.02.000031	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	N/A
32	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1
33	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	4
34	4.02.000034	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	180
35	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	45
36	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3
37	4.02.000037	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	45
38	4.02.000038	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	N/A
39	4.02.000039	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	N/A
40	4.02.000040	Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	N/A
41	4.02.000041	Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	4
42	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	180

1	2	3	4	5
43	4.02.000043	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1
44	4.02.000044	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12
45	4.02.000045	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	4
46	4.02.000046	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	5
47	4.02.000047	Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen	2
48	4.02.000048	Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen	2
49	4.02.000049	Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen	N/A
50	4.02.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Dokumen	N/A
51	4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	11
52	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1

Bidang Urusan : Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN	SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
1	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
2	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	2
3	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	3
4	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1
5	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1
6	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	0
7	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	1
8	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1
9	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	
10	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	
11	4.01.000011	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	
12	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	
13	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	
14	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	
15	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	
16	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	
17	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	
18	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	
19	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	
20	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	
21	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	
22	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	

1	2	3	4	5
23	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	
24	4.01.000024	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	
25	4.01.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	
26	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	
27	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	
28	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	
29	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	
30	4.01.000030	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	
31	4.01.000031	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	
32	4.01.000032	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	
33	4.01.000033	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	
34	4.01.000034	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	
35	4.01.000035	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	
36	4.01.000036	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	
37	4.01.000037	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	
38	4.01.000038	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	
39	4.01.000039	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	
40	4.01.000040	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	
41	4.01.000041	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	

1	2	3	4	5
42	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	
43	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	
44	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	
45	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	
46	4.01.000046	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	
47	4.01.000047	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	
48	4.01.000048	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	
49	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	
50	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	
51	4.01.000051	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	4
52	4.01.000052	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	
53	4.01.000053	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	
54	4.01.000054	Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	
55	4.01.000055	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	
56	4.01.000056	Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	
57	4.01.000057	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Laporan	
58	4.01.000058	Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi	Dokumen	
59	4.01.000059	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Dokumen	
60	4.01.000060	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Laporan	
61	4.01.000061	Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit	
62	4.01.000062	Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit	
63	4.01.000063	Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang	
64	4.01.000064	Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit	
65	4.01.000065	Perpustakaan yang Dibangun	Unit	
66	4.01.000066	Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit	
67	4.01.000067	Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit	
68	4.01.000068	Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang	

1	2	3	4	5
69	4.01.000069	Gedung Serba Guna	Unit	
70	4.01.000070	Perpustakaan	Unit	
71	4.01.000071	Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit	
72	4.01.000078	Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Unit	
73	4.01.000079	Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang	
74	4.01.000080	Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang	
75	4.01.000081	Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang	
76	4.01.000082	Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang	
77	4.01.000083	Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang	
78	4.01.000084	Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya	
79	4.01.000085	Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya	
80	4.01.000086	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen	
81	4.01.000087	Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan	Dokumen	
82	4.01.000088	Dokumen Hasil Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Dokumen	
83	4.01.000089	Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	
84	4.01.000090	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen	
85	4.01.000091	Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen	
86	4.01.000092	Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	Dokumen	
87	4.01.000093	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen	
88	4.01.000094	Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	
89	4.01.000095	Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	Dokumen	
90	4.01.000096	Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	
91	4.01.000097	PNS Mutasi Luar Daerah yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan	Orang	
92	4.01.000098	PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang	
93	4.01.000099	Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	Dokumen	

1	2	3	4	5
94	4.01.000100	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Laporan	
95	4.01.000101	Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen	
96	4.01.000102	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan	
97	4.01.000103	Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen	
98	4.01.000104	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Laporan	
99	4.01.000105	Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	
100	4.01.000106	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Laporan	
101	4.01.000107	Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	
102	4.01.000108	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan	
103	4.01.000109	Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	Unit	
104	4.01.000110	Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	Rekomendasi	
105	4.01.000111	Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Dokumen	
106	4.01.000112	Dokumen Hasil Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Dokumen	
107	4.01.000113	Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan	
108	4.01.000114	Laporan Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan	
109	4.01.000115	Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan	
110	4.01.000130	Laboratorium Pendidikan Tinggi	Unit	
111	4.01.000131	Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	
112	4.01.000132	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	
113	4.01.000133	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	
114	4.01.000134	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	

1	2	3	4	5
115	4.01.000135	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	
116	4.01.000136	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	
117	4.01.000137	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	
118	4.01.000138	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	
119	4.01.000139	Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	
120	4.01.000140	Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	
121	4.01.000141	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	
122	4.01.000142	Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	
123	4.01.000143	Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	
124	4.01.000144	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	
125	4.01.000145	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	
126	4.01.000146	Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	
127	4.01.000147	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	
128	4.01.000148	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	
129	4.01.000150	Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1
130	4.01.000151	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4
131	4.01.000152	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4
132	4.01.000153	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	

1	2	3	4	5
133	4.01.000154	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	
134	4.01.000155	Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	
135	4.01.000156	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	
136	4.01.000157	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	
137	4.01.000158	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	
138	4.01.000159	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	
139	4.01.000161	Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kab/Kota	Lembaga	
140	4.01.000163	Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	
141	4.01.000164	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen	
142	4.01.000165	Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	
143	4.01.000166	Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Dokumen	
144	4.01.000167	Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	
145	4.01.000168	Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Orang	
146	4.01.000169	Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan	
147	4.01.000170	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	Dokumen	
148	4.01.000171	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Laporan	
149	4.01.000172	Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun	Dokumen	
150	4.01.000174	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun	Dokumen	

1	2	3	4	5
151	4.01.000176	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	Dokumen	
152	4.01.000180	Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan	Unit	
153	4.01.000181	Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Disusun	Rekomendasi	
154	4.01.000182	Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Lembaga	
155	4.01.000183	Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	
156	4.01.000184	Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	

Bidang Urusan : Inspektorat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN	SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
1	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	76
2	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	14
3	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	20
4	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	122
5	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	N/A
6	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	N/A
7	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	86
8	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4
9	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	40
10	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8
11	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	12
12	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	23
13	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	14
14	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4
15	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	26
16	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	16

Bidang Urusan : Keuangan

NO.	KODE DSSD	URAIAN	SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
1	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	4
2	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4
3	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	48
4	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	48
5	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	48
6	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	4
7	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	8
8	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1
9	5.02.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	10
10	5.02.000011	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	48
11	5.02.000012	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1
12	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	55
13	5.02.000014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	1
14	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	2
15	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	1
16	5.02.000018	Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	NA
17	5.02.000019	Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	1
18	5.02.000020	BLUD yang Diasistensi	Lembaga	30
19	5.02.000021	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1

1	2	3	4	5
20	5.02.000022	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1
21	5.02.000023	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1
22	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	70
23	5.02.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	7
24	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	40
25	5.02.000027	Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1
26	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	100000
27	5.02.000029	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2
28	5.02.000030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	80
29	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	10
30	5.02.000032	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12

1	2	3	4	5
31	5.02.000033	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	12
32	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	4
33	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	47
34	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	147
35	5.02.000037	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	67
36	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	50
37	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	64
38	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	7
39	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	150
40	5.02.000042	Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1
41	5.02.000043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	2
42	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1
43	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2
44	5.02.000046	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1
45	5.02.000047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	130

1	2	3	4	5
46	5.02.000048	BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	30
47	5.02.000049	Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen	1
48	5.02.000050	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	NA
49	5.02.000051	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1
50	5.02.000052	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1
51	5.02.000053	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	1
52	5.02.000054	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	1
53	5.02.000055	Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	0
54	5.02.000056	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1
55	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1
56	5.02.000058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1
57	5.02.000059	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	0
58	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	12
59	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	70
60	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1
61	5.02.000063	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	0
62	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2
63	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	0
64	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	4
65	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2
66	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2
67	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	0
68	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	0

1	2	3	4	5
69	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3
70	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4
71	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1
72	5.02.000074	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100
73	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1
74	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1
75	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1
76	5.02.000078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3
77	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1
78	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1
79	5.02.000081	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	10
80	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	1
81	5.02.000083	Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	1
82	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	15387
83	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan /Penolakan	1
84	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	1
85	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1
86	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1
87	5.02.000093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	48
88	5.02.000101	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	22

1	2	3	4	5
89	5.02.000117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1
90	5.02.000123	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	130
91	5.02.000124	BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	30
92	5.02.000125	Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1
93	5.02.000126	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1
94	5.02.000135	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1
95	5.02.000138	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	70
96	5.02.000153	Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1
97	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1
98	5.02.000158	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	10
99	5.02.000160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	517.906
100	5.02.000161	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	10
101	5.02.000162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	15.387
102	5.02.000163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1
103	5.02.000164	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	250

Bidang Urusan : Perencanaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN	SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
1	5.01.000001	Aparatur yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	41
2	5.01.000002	Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen	1
3	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	15
4	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1
5	5.01.000005	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
6	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1
7	5.01.000009	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	NA
8	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1
9	5.01.000011	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	2
10	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	2
11	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1
12	5.01.000014	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1
13	5.01.000015	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2
14	5.01.000016	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2
15	5.01.000017	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1
16	5.01.000018	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1

1	2	3	4	5
17	5.01.000019	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2
18	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1
19	5.01.000023	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	NA
20	5.01.000024	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1
21	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1
22	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1
23	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1
24	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1
25	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1
26	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	6
27	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1
28	5.01.000032	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1
29	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1
30	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1
31	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1
32	5.01.000036	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1

1	2	3	4	5
33	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	NA
34	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1
35	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1
36	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1
37	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1
38	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1
39	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1
40	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	46
41	5.01.000045	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	46
42	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	1
43	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3
44	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20
45	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	6
46	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	12
47	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	3
48	5.01.000053	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	2

1	2	3	4	5
49	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3
50	5.01.000055	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	20
51	5.01.000056	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	6
52	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	12
53	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	3
54	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	2
55	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	46
56	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	125
57	5.01.000062	Peserta Musrenbang Provinsi	Orang	125
58	5.01.000064	Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2
59	5.01.000065	Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1186

Bidang Urusan : Penelitian dan Pengembangan

NO.	KODE DSSD	URAIAN	SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
1	5.05.000001	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	NA
2	5.05.000002	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	3
3	5.05.000003	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	NA
4	5.05.000004	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	NA
5	5.05.000005	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1
6	5.05.000006	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	NA
7	5.05.000007	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	NA
8	5.05.000008	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	NA
9	5.05.000009	laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	NA
10	5.05.000010	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	NA
11	5.05.000011	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	NA
12	5.05.000012	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	3
13	5.05.000013	Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomenda si	1

1	2	3	4	5
14	5.05.000014	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	1
15	5.05.000015	Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomenda si	NA
16	5.05.000016	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	NA
17	5.05.000017	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	NA
18	5.05.000018	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	NA
19	5.05.000019	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	NA
20	5.05.000020	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	NA
21	5.05.000021	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	NA
22	5.05.000022	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	NA
23	5.05.000023	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	NA
24	5.05.000024	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1
25	5.05.000025	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	NA
26	5.05.000026	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen	NA
27	5.05.000027	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	NA
28	5.05.000028	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1
29	5.05.000029	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	NA
30	5.05.000030	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	NA
31	5.05.000031	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	NA
32	5.05.000032	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	NA
33	5.05.000033	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
34	5.05.000034	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	NA
35	5.05.000035	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1
36	5.05.000036	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	NA
37	5.05.000037	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	NA
38	5.05.000038	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	NA
39	5.05.000039	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	NA
40	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	NA
41	5.05.000041	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	NA
42	5.05.000042	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	2
43	5.05.000043	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2
44	5.05.000044	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1
45	5.05.000045	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Dokumen	NA
46	5.05.000046	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Dokumen	NA
47	5.05.000047	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Dokumen	NA
48	5.05.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	NA
49	5.05.000050	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	NA
50	5.05.000051	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	NA

1	2	3	4	5
51	5.05.000052	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1
52	5.05.000057	Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	NA
53	5.05.000059	Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1
54	5.05.000062	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan	NA
55	5.05.000063	Riset Kebijakan	naskah	1
56	5.05.000064	Publikasi Ilmiah	naskah	24
57	5.05.000065	Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi	Lembaga	1
58	5.05.000066	Peserta Didik	Orang	NA
59	5.05.000067	Repositori Ilmiah	Dokumen	1
60	5.05.000068	Rencana Induk dan Peta Jalan	Dokumen	NA
61	5.05.000069	Naskah Kebijakan	Dokumen	2
62	5.05.000070	Infrastruktur Riset dan Inovasi	Unit	1
63	5.05.000071	Kebun Raya Daerah	Unit	NA
64	5.05.000072	Anggaran Riset	TOE/Milyar Rupiah	1,16
65	5.05.000073	Hak Kekayaan Intelektual	Unit	1
66	5.05.000074	Perjanjian Kerja Sama	Dokumen	NA
67	5.05.000075	Sosialisasi dan Diseminasi	Dokumen	2
68	5.05.000076	Lokakarya, Pameran, dan Promosi	Berita Acara	1
69	5.05.000077	Apresiasi Riset dan Inovasi	Berita Acara	1
70	5.05.000078	Perusahaan Rintisan	Unit	NA
71	5.05.000079	Kodefikasi Teknologi Masyarakat	Unit	NA
72	5.05.000080	Produk Unggulan Daerah	Unit	16
73	5.05.000081	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah	Unit	NA
74	5.05.000082	Lokakarya	Dokumen	NA
75	5.05.000083	Riset dan Seminar Internasional	Berita Acara	NA
76	5.05.000084	Pakta Kerja Sama Internasional	naskah	NA
77	5.05.000085	Rapat Koordinasi Teknis	Berita Acara	0
78	5.05.000086	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1
79	5.05.000087	Perangkat Lunak	Aplikasi	1
80	5.05.000088	Pendampingan Masyarakat	Berita Acara	1
81	5.05.000089	Daftar Kerja Sama	Dokumen	NA
82	5.05.000090	Laporan Kinerja	naskah	18

Bidang Urusan : Kepegawaian

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	5.03.000001	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	1
2	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2
3	5.03.000004	Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	2
4	5.03.000005	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	1
5	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	2
6	5.03.000007	Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	1
7	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	2
8	5.03.000009	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1
9	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1
10	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1
11	5.03.000012	Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1
12	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	12
13	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	4
14	5.03.000015	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	12
15	5.03.000016	ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	414
16	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	12
17	5.03.000018	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1
18	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1
19	5.03.000020	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1
20	5.03.000021	ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	15
21	5.03.000022	Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	1
22	5.03.000023	ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	15
23	5.03.000025	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	15
24	5.03.000026	Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1
25	5.03.000027	Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	1
26	5.03.000028	Fungsional ASN yang Dibina	Orang	19
27	5.03.000029	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	1

1	2	3	4	5
28	5.03.000030	Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1
29	5.03.000031	Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1
30	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1
31	5.03.000033	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1
32	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	59
33	5.03.000035	ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	59
34	5.03.000036	Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1
35	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	2
36	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	2
37	5.03.000039	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	1
38	5.03.000040	Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1
39	5.03.000047	Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	1
40	5.03.000059	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	220
41	5.03.000061	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	Orang	0
42	5.03.000064	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	1
43	5.03.000065	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang	15
44	5.03.000066	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1
45	5.03.000067	Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	1
46	5.03.000068	ASN Fungsional yang Dibina	Orang	19
47	5.03.000069	ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	809

Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
2	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
3	8.01.000003	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
4	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
5	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
6	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
7	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
8	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
9	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
10	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
11	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
12	8.01.000012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
13	8.01.000013	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)

1	2	3	4	5
14	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
15	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
16	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
17	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
18	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
19	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
20	8.01.000020	Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
21	8.01.000021	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
22	8.01.000022	Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
23	8.01.000023	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
24	8.01.000024	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
25	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
26	8.01.000026	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)

1	2	3	4	5
27	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
28	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
29	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	360
30	8.01.000030	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	360
31	8.01.000031	Purnapaskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
32	8.01.000032	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
33	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
34	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
35	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
36	8.01.000036	Training of Trainer Kepamongan	Kegiatan	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
37	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
38	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan paskibraka	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
39	8.01.000039	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)

1	2	3	4	5
40	8.01.000040	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
41	8.01.000041	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100
42	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100
43	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
44	8.01.000044	Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
45	8.01.000045	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
46	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
47	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
48	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)

1	2	3	4	5
49	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
50	8.01.000050	Paskibraka	Orang	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
51	8.01.000051	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
52	8.01.000052	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari program)
53	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	2275
54	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	8

1	2	3	4	5
55	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	8
56	8.01.000057	Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari program)
57	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	10
58	8.01.000061	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
59	8.01.000062	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
60	8.01.000063	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100

1	2	3	4	5
61	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100
62	8.01.000065	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
63	8.01.000066	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
64	8.01.000067	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari program)
65	8.01.000068	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	416

1	2	3	4	5
66	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	314
67	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	15
68	8.01.000072	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
69	8.01.000073	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari program)
70	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100
71	8.01.000088	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	NA (Pelaksanaan Kegiatan Paskibra TA 2023 berada di Dispora)
72	8.01.000089	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)

1	2	3	4	5
73	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100
74	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	20
75	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)
76	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan merupakan output indikator dari subkegiatan)

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.01.000001	Asrama sekolah	Unit	19
2	1.01.000002	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	NA
3	1.01.000003	Asrama sekolah yang layak	Unit	NA
4	1.01.000004	Asrama sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	NA
5	1.01.000005	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	NA
6	1.01.000007	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	Bahasa	1
7	1.01.000008	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	Bahasa	1
8	1.01.000009	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya	Bahasa	1
9	1.01.000013	Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	NA
10	1.01.000014	Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	NA
11	1.01.000015	Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	NA
12	1.01.000020	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi	Buku	200
13	1.01.000022	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buah	NA
14	1.01.000023	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan	Buah	NA
15	1.01.000024	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buah	NA
16	1.01.000028	Dayah yang memiliki tempat ibadah	Dayah	487
17	1.01.000029	Dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya	Satuan Pendidikan	1214
18	1.01.000030	Dayah yang telah dibina sesuai dengan ketentuan	Satuan Pendidikan	
19	1.01.000033	Dayah yang terakrditasi A	Satuan Pendidikan	
20	1.01.000034	Dayah yang terakrditasi B	Satuan Pendidikan	
21	1.01.000035	Dayah yang yang belum terakreditasi	Satuan Pendidikan	
22	1.01.000036	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3
23	1.01.000037	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3
24	1.01.000040	Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
25	1.01.000042	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	NA
26	1.01.000043	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4
27	1.01.000046	Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen	NA
28	1.01.000049	Fasilitas bermain	Unit	NA
29	1.01.000050	Fasilitas Parkir	Unit	NA
30	1.01.000051	Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi	Unit	NA
31	1.01.000052	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Ruang	8
32	1.01.000053	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	NA
33	1.01.000054	gedung PAUD	Unit	7754
34	1.01.000055	gedung PAUD yang layak	Unit	NA
35	1.01.000056	Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi	Ruang	NA
36	1.01.000057	gedung PAUD yang rusak sedang/berat	Unit	NA
37	1.01.000058	Gedung PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	NA
38	1.01.000059	gedung PKBM	Unit	18
39	1.01.000060	gedung PKBM yang layak	Unit	130
40	1.01.000061	gedung PKBM yang rusak sedang/berat	Unit	130
41	1.01.000062	Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	NA
42	1.01.000063	Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	NA
43	1.01.000064	Gudang	Unit	NA
44	1.01.000065	Guru yang memiliki rumah dinas	Orang	NA
45	1.01.000067	Kamus Bahasa daerah yang tersusun	Kamus	NA
46	1.01.000068	Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	NA
47	1.01.000069	Kantin Sekolah yang telah dibangun	Unit	NA
48	1.01.000070	Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	NA
49	1.01.000071	Kekurangan pendidik	Orang	NA
50	1.01.000072	Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas	Orang	NA
51	1.01.000073	Kitab/Buku Pendidikan Dayah tersedia	Buku	NA
52	1.01.000074	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen	NA
53	1.01.000075	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	NA
54	1.01.000079	Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tersusun	Dokumen	NA
55	1.01.000082	Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Ruang	111
56	1.01.000083	Media pendidikan	Paket	NA
57	1.01.000084	Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	NA
58	1.01.000086	pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	NA
59	1.01.000089	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	4662

1	2	3	4	5
60	1.01.000090	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	2267
61	1.01.000093	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	1954
62	1.01.000094	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	1055
63	1.01.000095	Pendidik Dayah yang telah lulus sertifikasi	Orang	
64	1.01.000096	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Orang	NA
65	1.01.000097	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Orang	NA
66	1.01.000098	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Orang	NA
67	1.01.000099	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang meningkat kompetensinya	Orang	
68	1.01.000100	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	Orang	
69	1.01.000101	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan	Orang	
70	1.01.000102	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	Orang	
71	1.01.000103	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang didistribusikan	Orang	
72	1.01.000107	Pendidik dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang telah lulus sertifikasi	Orang	
73	1.01.000108	Pendidik Dayah	Orang	
74	1.01.000109	Pendidik Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	
75	1.01.000110	Pendidik Non ASN	Orang	
76	1.01.000111	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	113
77	1.01.000112	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	113
78	1.01.000113	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	NA
79	1.01.000114	Pendidik pada satuan PAUD	Orang	1522
80	1.01.000115	Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	1008
81	1.01.000116	Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	458

1	2	3	4	5
82	1.01.000117	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	3681
83	1.01.000119	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	1506
84	1.01.000120	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Orang	NA
85	1.01.000123	Pendidikan Menengah yang telah dilakukan Penilaian terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Satuan Pendidikan	NA
86	1.01.000125	Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas	Orang	NA

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	0
2	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	25
3	1.02.000004	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	4
4	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	28113
5	1.02.000008	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	122208
6	1.02.000009	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	167
7	1.02.000010	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Sarana	0
8	1.02.000011	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Sarana	0
9	1.02.000012	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Sarana	167
10	1.02.000014	Balita	Orang	47676
11	1.02.000016	Bayi baru lahir	Orang	10900
12	1.02.000018	BMHP yang disediakan	Paket	1
13	1.02.000021	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dokumen	NA
14	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	41
15	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	3
16	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	6
17	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	6
18	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	3
19	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	0
20	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	3
21	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	1
22	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	2
23	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	3
24	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	7
25	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	3
26	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	3
27	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	2
28	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	216
29	1.02.000038	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
30	1.02.000039	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	1
31	1.02.000041	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	NA
32	1.02.000044	Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	NA
33	1.02.000045	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	20
34	1.02.000047	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	NA
35	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	8
36	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	9
37	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1
38	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	NA
39	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	7
40	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	11
41	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	NA
42	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4
43	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1
44	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1
45	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	9
46	1.02.000063	Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	NA
47	1.02.000064	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	NA
48	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	7
49	1.02.000066	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	7
50	1.02.000067	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	1

1	2	3	4	5
51	1.02.000068	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1
52	1.02.000069	Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Dokumen	NA
53	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1
54	1.02.000071	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	NA
55	1.02.000072	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	NA
56	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	25
57	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	25
58	1.02.000075	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	25
59	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	3
60	1.02.000077	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	25
61	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	25
62	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	196
63	1.02.000081	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau	Unit	NA
64	1.02.000082	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	0
65	1.02.000083	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	0
66	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	0
67	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	196
68	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	196
69	1.02.000087	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	NA
70	1.02.000088	Faskes lainnya	Unit	NA
71	1.02.000089	Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Unit	NA
72	1.02.000090	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	NA

1	2	3	4	5
73	1.02.000091	Gudang umum	Unit	NA
74	1.02.000092	Handuk	Paket	NA
75	1.02.000093	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	116
76	1.02.000094	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	NA
77	1.02.000095	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	NA
78	1.02.000096	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dokumen	NA
79	1.02.000097	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	NA
80	1.02.000098	HCU	Unit	NA
81	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	10875
82	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	11489
83	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	NA
84	1.02.000102	ICU	Unit	NA
85	1.02.000103	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	624
86	1.02.000104	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	NA
87	1.02.000105	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	NA
88	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4
89	1.02.000107	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	NA
90	1.02.000108	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	9
91	1.02.000109	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	NA
92	1.02.000110	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Keluarga	NA
93	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	NA
94	1.02.000112	layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK):	Layanan	NA

1	2	3	4	5
95	1.02.000113	NICU	Unit	NA
96	1.02.000114	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	3
97	1.02.000115	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	NA
98	1.02.000116	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	3736
99	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	Orang	NA
100	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	Orang	14993
101	1.02.000119	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	6691
102	1.02.000120	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	2306
103	1.02.000121	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Orang	46645
104	1.02.000122	Organisasi masyarakat bidang kesehatan	Organisasi Masyarakat	NA
105	1.02.000123	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	NA
106	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	NA
107	1.02.000141	penyalahguna NAPZA	Orang	NA
108	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualitas	9
109	1.02.000143	Peralatan di laundry	Unit	0
110	1.02.000144	Peralatan di ruang CSSD	Unit	NA
111	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	NA
112	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	NA
113	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	NA
114	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	NA
115	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	NA
116	1.02.000150	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	NA
117	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	NA
118	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	NA
119	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	NA
120	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	NA
121	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	NA
122	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	37
123	1.02.000157	Perizinan Industri Rumah Tangga	Unit	NA
124	1.02.000158	PICU	Unit	NA
125	1.02.000159	Prasarana di Fasyankes	Unit	NA
126	1.02.000160	Prasarana Fasyankes	Unit	NA
127	1.02.000161	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	NA
128	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	1
129	1.02.000164	Puskesmas	Unit	25
130	1.02.000165	RICU	Unit	NA
131	1.02.000166	Ruang administrasi	Unit	NA
132	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	NA
133	1.02.000168	Ruang ASI	Unit	NA
134	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	NA

1	2	3	4	5
135	1.02.000170	Ruang cuci linen	Unit	NA
136	1.02.000171	Ruang dinas Nakes	Unit	NA
137	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	NA
138	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	NA
139	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	NA
140	1.02.000175	Ruang jaga petugas	Unit	NA
141	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	NA
142	1.02.000177	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	NA
143	1.02.000178	Ruang Kepala Puskersmas	Unit	NA
144	1.02.000179	Ruang kesehatan anak dan iminisasi	Unit	NA
145	1.02.000180	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	NA
146	1.02.000181	Ruang kesesahatan ibu dan KB	Unit	NA
147	1.02.000182	Ruang KIE	Unit	NA
148	1.02.000183	Ruang Laboratorium	Unit	NA
149	1.02.000184	Ruang Loundry	Unit	NA
150	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	NA
151	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	NA
152	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	NA
153	1.02.000188	Ruang pemeriksaan khusus	Unit	NA
154	1.02.000189	Ruang pemeriksaan umum	Unit	NA
155	1.02.000190	Ruang Penanggulangan Kebakaran	Unit	NA
156	1.02.000191	Ruang pendaftaran dan rekam medik	Unit	NA
157	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	NA
158	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	NA
159	1.02.000194	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	Unit	NA
160	1.02.000195	Ruang persalinan	Unit	NA
161	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	NA
162	1.02.000197	Ruang rapat/diskusi	Unit	NA
163	1.02.000198	Ruang Rawat Inap	Unit	NA
164	1.02.000199	Ruang Rawat Intentif:	Unit	NA
165	1.02.000200	Ruang Rawat Jalan	Unit	NA
166	1.02.000201	Ruang rawat pasca persalinan	Unit	NA
167	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	NA
168	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	NA
169	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	NA
170	1.02.000205	Ruang tindakan dan gawat daerurat	Unit	NA
171	1.02.000206	Ruang tunggu	Unit	NA
172	1.02.000207	Rumah dinas Nakes	Unit	NA
173	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	12
174	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	1
175	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	1
176	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	1
177	1.02.000212	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	0
178	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	0
179	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	Unit	5
180	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	11

1	2	3	4	5
181	1.02.000216	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	11
182	1.02.000217	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	11
183	1.02.000218	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	0
184	1.02.000219	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	0
185	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	Unit	6
186	1.02.000221	Sarana di Fasyankes	Unit	NA
187	1.02.000222	sarana Fasyankes	Unit	NA
188	1.02.000223	Sarana Fasyankes eksisting	Unit	NA
189	1.02.000224	sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	NA
190	1.02.000225	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	NA
191	1.02.000226	Sprei	Paket	NA
192	1.02.000227	Telemedicine	Unit	NA
193	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	1089
194	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	267
195	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	87
196	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	1086
197	1.02.000232	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	54
198	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	1761
199	1.02.000234	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	87
200	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	30
201	1.02.000236	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	0
202	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	53
203	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	79
204	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	2
205	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	255
206	1.02.000241	Tenaga keterapiian fisik	Orang	78
207	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	231
208	1.02.000243	Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC)	Unit	NA
209	1.02.000244	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	NA
210	1.02.000245	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	NA
211	1.02.000246	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin	Sarana	NA
212	1.02.000257	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	Unit	NA
213	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	1
214	1.02.000259	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	NA

1	2	3	4	5
215	1.02.000260	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	Sarana	1
216	1.02.000261	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	Layanan	NA
217	1.02.000262	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	NA
218	1.02.000263	Penderita Diabetes Melitus	Orang	735
219	1.02.000264	Penderita Hipertensi	Orang	7126
220	1.02.000265	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	971588
221	1.02.000266	Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Orang	NA
222	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	NA
223	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	NA
224	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	NA
225	1.02.000270	Penduduk Usia Lanjut	Orang	4718
226	1.02.000271	Penduduk Usia Produktif	Orang	540240
227	1.02.000272	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	NA
228	1.02.000273	Pengolahan Limbah	Unit	NA
229	1.02.000274	Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC	Unit	NA
230	1.02.000275	Alat Kesehatan	Unit	28113
231	1.02.000276	Labkesda	Unit	1
232	1.02.000277	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	13
233	1.02.000278	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	NA
234	1.02.000279	Kasus penyakit menular dan tidak menular	Kasus	NA
235	1.02.000280	Kasus Penyakit IMS	Kasus	13
236	1.02.000281	Kasus Penyakit Campak	Kasus	40
237	1.02.000283	Kasus Penyakit Kusta	Kasus	29
238	1.02.000286	Kasus Penyakit Filariasis	Kasus	10
239	1.02.000287	Kasus Penyakit Kecacingan	Kasus	0
240	1.02.000288	Kasus Penyakit Frambusia	Kasus	0
241	1.02.000291	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
242	1.02.000292	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	NA
243	1.02.000293	Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen	NA
244	1.02.000294	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen	NA
245	1.02.000295	Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	Laporan	1
246	1.02.000296	Perizinan yang diterbitkan	Dokumen	NA
247	1.02.000297	Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit	NA
248	1.02.000302	Tenaga pengajar ilmu kesehatan	Orang	NA
249	1.02.000307	Tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang	NA
250	1.02.000308	Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya	Orang	NA
251	1.02.000311	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	NA
252	1.02.000312	Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit	Dokumen	25
253	1.02.000313	Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit	NA
254	1.02.000317	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	139895
255	1.02.000319	penderita Tuberkulosis	Orang	1239
256	1.02.000320	penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	1239
257	1.02.000321	Penderita HIV (ODHIV)	Orang	206
258	1.02.000322	Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	151
259	1.02.000323	Orang berisiko terjangkit Malaria	Orang	NA
260	1.02.000324	Orang terjangkit (penderita) Malaria	Orang	21
261	1.02.000325	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi	Dokumen	NA
262	1.02.000326	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
263	1.02.000327	Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	NA
264	1.02.000328	Sarana Air Minum Komunal	Sarana	177
265	1.02.000329	Sarana Sanitasi	Sarana	NA
266	1.02.000330	Tatanan kawasan tanpa rokok	Kawasan	7
267	1.02.000331	Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	Kawasan	3

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.03.000005	Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
2	1.03.000006	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
3	1.03.000007	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
4	1.03.000008	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
5	1.03.000009	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
6	1.03.000010	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
7	1.03.000011	Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
8	1.03.000013	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
9	1.03.000015	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
10	1.03.000018	Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	NA (Bukan kewenangan DPU)
11	1.03.000019	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	NA (Bukan kewenangan DPU)
12	1.03.000021	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
13	1.03.000024	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
14	1.03.000026	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	NA (Bukan kewenangan DPU)
15	1.03.000031	Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
16	1.03.000032	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
17	1.03.000033	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
18	1.03.000035	Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
19	1.03.000037	Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
20	1.03.000038	Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
21	1.03.000040	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
22	1.03.000043	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
23	1.03.000044	Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
24	1.03.000051	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
25	1.03.000055	Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
26	1.03.000067	Dokumen Fasilitas RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
27	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	1
28	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	1
29	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	1
30	1.03.000075	Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
31	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
32	1.03.000079	Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
33	1.03.000080	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
34	1.03.000081	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
35	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	1
36	1.03.000084	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	1
37	1.03.000086	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
38	1.03.000087	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
39	1.03.000088	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
40	1.03.000089	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
41	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	2
42	1.03.000108	Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-SermoWates	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
43	1.03.000109	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
44	1.03.000110	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
45	1.03.000111	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
46	1.03.000112	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
47	1.03.000115	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
48	1.03.000116	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
49	1.03.000117	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
50	1.03.000118	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
51	1.03.000119	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
52	1.03.000120	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
53	1.03.000121	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)

1	2	3	4	5
54	1.03.000122	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
55	1.03.000123	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
56	1.03.000124	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
57	1.03.000125	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
58	1.03.000126	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
59	1.03.000127	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
60	1.03.000130	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
61	1.03.000132	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	1
62	1.03.000133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	1
63	1.03.000134	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	1
64	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	2
65	1.03.000136	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
66	1.03.000137	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
67	1.03.000139	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
68	1.03.000140	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
69	1.03.000141	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2

1	2	3	4	5
70	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
71	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	24
72	1.03.000154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0
73	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	1
74	1.03.000158	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	NA
75	1.03.000159	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	1
76	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	21
77	1.03.000163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	NA
78	1.03.000164	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	NA
79	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	NA
80	1.03.000166	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	NA
81	1.03.000178	Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
82	1.03.000182	Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
83	1.03.000186	Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
84	1.03.000189	Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
85	1.03.000191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	NA
86	1.03.000192	Flyover	Flyover	0

1	2	3	4	5
87	1.03.000193	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Forum Penataan Ruang	NA (Bukan kewenang an DPU)
88	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	9
89	1.03.000198	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
90	1.03.000203	Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	NA
91	1.03.000207	Kapasitas TPA	M ³ /Hari	NA (Bukan kewenang an DPU)
92	1.03.000209	Kapasitas TPS	M ³ /Hari	NA (Bukan kewenang an DPU)
93	1.03.000210	Kapasitas TPS-3R	M ³ /Hari	NA (Bukan kewenang an DPU)
94	1.03.000211	Kapasitas TPST	M ³ /Hari	NA (Bukan kewenang an DPU)
95	1.03.000212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	1,5
96	1.03.000213	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	893,62
97	1.03.000214	Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang	Kasus	NA (Bukan kewenang an DPU)
98	1.03.000215	Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	NA (Bukan kewenang an DPU)
99	1.03.000216	Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	NA (Bukan kewenang an DPU)
100	1.03.000219	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kegiatan	NA (Bukan kewenang an DPU)
101	1.03.000220	Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)

1	2	3	4	5
102	1.03.000226	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
103	1.03.000227	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
104	1.03.000228	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
105	1.03.000236	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	120
106	1.03.000237	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Lembaga	NA
107	1.03.000239	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	1
108	1.03.000241	Luas Lahan yang Ditetapkan dalam Bidang Penataan Ruang	Ha	NA (Bukan kewenangan DPU)
109	1.03.000243	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
110	1.03.000244	Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)	Dokumen	NA
111	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	0,027
112	1.03.000247	Panjang Breakwater	KM	0
113	1.03.000249	Panjang Jalan	KM	1020,25
114	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	0,228
115	1.03.000252	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	NA (Bukan kewenangan DPU)
116	1.03.000254	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
117	1.03.000255	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
118	1.03.000257	Panjang Sungai	KM	NA
119	1.03.000258	Panjang Tanggul	KM	NA

1	2	3	4	5
120	1.03.000268	Penerbitan PKKPR	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
121	1.03.000269	Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
122	1.03.000272	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
123	1.03.000276	Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
124	1.03.000278	Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
125	1.03.000279	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	PPNS	NA (Bukan kewenangan DPU)
126	1.03.000281	Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)	Dokumen	NA
127	1.03.000285	Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
128	1.03.000286	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
129	1.03.000290	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	Dokumen	NA
130	1.03.000292	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
131	1.03.000293	Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
132	1.03.000294	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
133	1.03.000296	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
134	1.03.000298	Rapat persetujuan substansi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
135	1.03.000299	Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
136	1.03.000300	Rapat Persiapan persetujuan substansi	Dokumen	NA
137	1.03.000301	Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
138	1.03.000303	Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
139	1.03.000304	Rekomendasi peta dari BIG	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
140	1.03.000306	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
141	1.03.000307	Rumah Deret	Rumah	NA (Bukan kewenangan DPU)
142	1.03.000309	Rumah Tangga	Rumah Tangga	NA (Bukan kewenangan DPU)
143	1.03.000311	Rumah Tinggal Tunggal	Rumah	NA (Bukan kewenangan DPU)
144	1.03.000315	Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Unit	2
145	1.03.000316	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	2
146	1.03.000332	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
147	1.03.000333	SPA	SPA	NA
148	1.03.000336	Stasiun Pompa Banjir	Unit	NA

1	2	3	4	5
149	1.03.000341	Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
150	1.03.000342	Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
151	1.03.000345	Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota	Dokumen	NA
152	1.03.000347	Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
153	1.03.000350	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
154	1.03.000351	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
155	1.03.000352	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota	Dokumen	NA
156	1.03.000357	Terowongan/Tunnel	Terowongan /Tunnel	NA
157	1.03.000358	TPA	TPA	NA (Bukan kewenang an DPU)
158	1.03.000360	TPS	TPS	NA (Bukan kewenang an DPU)
159	1.03.000362	TPST	TPST	NA (Bukan kewenang an DPU)
160	1.03.000364	Underpass	Underpass	NA
161	1.03.000367	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	Dokumen	NA
162	1.03.000373	Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)	Orang	7
163	1.03.000374	Jumlah Penilik	Orang	12
164	1.03.000375	Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)	Orang	13
165	1.03.000378	Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota	Paket	NA (Bukan kewenang an DPU)

1	2	3	4	5
166	1.03.000379	Fasilitas Penunjang TPS	Paket	NA (Bukan kewenangan DPU)
167	1.03.000384	Jumlah Arsitek yang terdaftar	Orang	6
168	1.03.000386	Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	0
169	1.03.000387	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha	24
170	1.03.000388	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Badan Usaha	17
171	1.03.000390	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
172	1.03.000391	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
173	1.03.000392	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
174	1.03.000393	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
175	1.03.000394	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
176	1.03.000395	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
177	1.03.000396	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
178	1.03.000397	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
179	1.03.000398	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
180	1.03.000399	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
181	1.03.000400	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
182	1.03.000401	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
183	1.03.000404	Jumlah Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	NA (Bukan kewenangan DPU)
184	1.03.000405	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	NA (Bukan kewenangan DPU)
185	1.03.000406	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
186	1.03.000407	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
187	1.03.000409	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
188	1.03.000411	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
189	1.03.000412	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
190	1.03.000413	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
191	1.03.000414	Jumlah Bangunan Konstruksi	Unit	12
192	1.03.000415	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota	Unit	12
193	1.03.000417	Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	NA
194	1.03.000419	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
195	1.03.000421	Jumlah Desa	Desa	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
196	1.03.000422	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
197	1.03.000423	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
198	1.03.000424	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
199	1.03.000425	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	0
200	1.03.000426	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU	Dokumen	NA
201	1.03.000427	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	0
202	1.03.000428	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Dokumen	NA
203	1.03.000429	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok	Dokumen	0
204	1.03.000430	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
205	1.03.000431	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	0
206	1.03.000433	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	1
207	1.03.000434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	0
208	1.03.000435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen	0
209	1.03.000436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	0
210	1.03.000437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	0
211	1.03.000438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	0

1	2	3	4	5
212	1.03.000441	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	2
213	1.03.000444	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
214	1.03.000446	Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	NA
215	1.03.000447	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
216	1.03.000449	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
217	1.03.000451	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	0
218	1.03.000452	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
219	1.03.000454	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	11
220	1.03.000455	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
221	1.03.000457	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
222	1.03.000458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	NA
223	1.03.000459	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	NA
224	1.03.000460	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
225	1.03.000462	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
226	1.03.000464	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	0
227	1.03.000466	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	0
228	1.03.000467	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
229	1.03.000469	Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	0
230	1.03.000470	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
231	1.03.000474	Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	33
232	1.03.000475	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0
233	1.03.000476	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
234	1.03.000477	Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	NA
235	1.03.000478	Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	1
236	1.03.000479	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	2
237	1.03.000480	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
238	1.03.000481	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
239	1.03.000482	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)	Dokumen	NA
240	1.03.000483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
241	1.03.000484	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
242	1.03.000486	Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen	30
243	1.03.000489	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen	1
244	1.03.000492	Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	Dokumen	0
245	1.03.000494	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	0

1	2	3	4	5
246	1.03.000495	Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	33
247	1.03.000497	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	0
248	1.03.000500	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	NA (Bukan kewenang an DPU)
249	1.03.000501	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten/ Kota	NA (Bukan kewenang an DPU)
250	1.03.000502	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik	Dokumen	1
251	1.03.000503	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan	Dokumen	NA (Bukan kewenang an DPU)
252	1.03.000504	Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kegiatan	NA
253	1.03.000505	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	1
254	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	NA
255	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	NA
256	1.03.000508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	NA
257	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	NA
258	1.03.000510	Jumlah Lembaga Sistem Drainase Lingkungan	Lembaga	NA
259	1.03.000512	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	33
260	1.03.000513	Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjang	Lisensi	NA (Bukan kewenang an DPU)
261	1.03.000514	Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkan	Lisensi	NA (Bukan kewenang an DPU)
262	1.03.000515	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	NA (Bukan kewenang an DPU)

1	2	3	4	5
263	1.03.000517	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Paket	209
264	1.03.000519	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
265	1.03.000520	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
266	1.03.000521	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
267	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	NA
268	1.03.000530	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	NA
269	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	NA
270	1.03.000533	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Paket	NA
271	1.03.000535	Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat	Paket	NA
272	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	1
273	1.03.000542	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	NA
274	1.03.000543	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
275	1.03.000544	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1
276	1.03.000546	Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
277	1.03.000548	Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
278	1.03.000550	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	10
279	1.03.000552	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	10
280	1.03.000554	Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan	KM	0
281	1.03.000555	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	NA
282	1.03.000556	Jumlah Sistem Pengelola Persampahan Kabupaten/Kota	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
283	1.03.000558	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	33
284	1.03.000559	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0
285	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	33
286	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	33
287	1.03.000563	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	0
288	1.03.000564	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dokumen	10
289	1.03.000566	Jumlah SPA	Unit	NA
290	1.03.000567	Jumlah SPALD	Unit	1300
291	1.03.000568	Jumlah SPAM	Unit	3160
292	1.03.000570	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	10
293	1.03.000571	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Orang	NA
294	1.03.000572	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
295	1.03.000573	Jumlah TPS	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
296	1.03.000574	Jumlah TPS-3R	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
297	1.03.000575	Jumlah TPST	Unit	NA (Bukan kewenang an DPU)
298	1.03.000578	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	MÂ³/Hari	19,5
299	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	MÂ³/Hari	NA
300	1.03.000583	Kapasitas SPA	Ton/hari	NA
301	1.03.000584	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenang an DPU)
302	1.03.000586	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenang an DPU)
303	1.03.000588	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenang an DPU)
304	1.03.000590	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenang an DPU)
305	1.03.000592	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenang an DPU)
306	1.03.000594	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Â 893,62
307	1.03.000596	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	2,5
308	1.03.000597	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	84,16
309	1.03.000599	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	NA
310	1.03.000602	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	KM	0
311	1.03.000603	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	KM	75,88
312	1.03.000608	Pendataan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	NA
313	1.03.000609	Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Regulasi	NA
314	1.03.000610	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	NA
315	1.03.000612	Kapasitas IPLT	MÂ³/Hari	19,5

1	2	3	4	5
316	1.03.000614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	10
317	1.03.000615	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	1
318	1.03.000616	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	NA
319	1.03.000617	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Paket	NA
320	1.03.000623	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	NA
321	1.03.000625	Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	m ³ /hari	NA
322	1.03.000626	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	NA
323	1.03.000627	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	NA
324	1.03.000628	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya	Lembaga	NA
325	1.03.000629	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	NA
326	1.03.000630	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik	Lembaga	NA
327	1.03.000631	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD	Lembaga	NA
328	1.03.000632	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas effluen air limbah domestik	Lembaga	NA
329	1.03.000637	Pembangunan Bendungan	Bendungan	NA
330	1.03.000638	Rehabilitasi Bendungan	Unit	NA
331	1.03.000639	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	NA
332	1.03.000641	Jumlah Pembangunan Penampung Air	Unit	NA
333	1.03.000642	Panjang Pembangunan Kanal Banjir	Km	NA
334	1.03.000643	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	1

1	2	3	4	5
335	1.03.000644	Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya	Unit	NA
336	1.03.000645	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	50
337	1.03.000646	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	NA
338	1.03.000647	Jumlah Pembangunan Unit Air Baku	Unit	42
339	1.03.000648	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	Unit	NA
340	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	NA
341	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	NA
342	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	NA
343	1.03.000652	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Unit	NA
344	1.03.000653	Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir	Unit	NA
345	1.03.000654	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	NA
346	1.03.000655	Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir	Km	NA
347	1.03.000656	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Unit	NA
348	1.03.000657	Jumlah Pembangunan Polder	Unit	NA
349	1.03.000658	Jumlah Pembangunan Kolam Retensi	Unit	NA
350	1.03.000659	Jumlah Rehabilitasi Polder	Unit	NA
351	1.03.000660	Jumlah Rehabilitasi Kolam Retensi	Unit	NA
352	1.03.000661	Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo	Unit	NA
353	1.03.000662	Jumlah Rehabilitasi Check dam	Unit	NA
354	1.03.000663	Jumlah Pembangunan Check Dam	Unit	NA
355	1.03.000664	Panjang Pembangunan Seawall	Km	NA
356	1.03.000665	Panjang Rehabilitasi Seawall	Km	NA
357	1.03.000666	Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Km	NA
358	1.03.000667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	NA
359	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	NA
360	1.03.000669	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	NA
361	1.03.000670	Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir	Unit	NA
362	1.03.000671	panjang Peningkatan Kanal Banjir	Km	NA
363	1.03.000672	Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Unit	NA
364	1.03.000673	Jumlah Peningkatan Polder	Unit	NA
365	1.03.000674	Jumlah Peningkatan Kolam Retensi	Unit	NA
366	1.03.000675	Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo	Unit	NA
367	1.03.000676	Jumlah Peningkatan Check DAM	Unit	NA
368	1.03.000677	Peningkatan Panjang Breakwater	Km	NA

1	2	3	4	5
369	1.03.000678	Panjang Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai	Km	NA
370	1.03.000679	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Unit	NA
371	1.03.000680	Jumlah Revitalisasi Danau	Danau	NA
372	1.03.000681	Jumlah Revitalisasi Situ	SITU	NA
373	1.03.000682	Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami	Penampung Air Alami	NA
374	1.03.000683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	NA
375	1.03.000684	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Unit	NA
376	1.03.000685	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Bendungan	2
377	1.03.000686	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	1
378	1.03.000688	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Unit	NA
379	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	NA
380	1.03.000690	Pembangunan Jumlah Unit Air Baku	Unit	NA
381	1.03.000691	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	NA
382	1.03.000692	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Unit	1
383	1.03.000693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	NA
384	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	0,33
385	1.03.000695	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Km	NA
386	1.03.000696	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Unit	NA
387	1.03.000697	Operasi dan Pemeliharaan Polder	Unit	NA
388	1.03.000698	Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi	Unit	NA
389	1.03.000699	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Unit	NA
390	1.03.000700	Operasi dan Pemeliharaan Check DAM	Unit	NA
391	1.03.000701	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater	Km	NA
392	1.03.000702	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Seawall	Km	NA
393	1.03.000703	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai	Km	NA
394	1.03.000704	Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	NA
395	1.03.000705	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	NA
396	1.03.000706	Pembangunan Panjang Irigasi Tambak	Km	NA
397	1.03.000707	Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	1

1	2	3	4	5
398	1.03.000708	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
399	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	NA
400	1.03.000710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	NA
401	1.03.000711	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	NA
402	1.03.000712	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	NA
403	1.03.000713	Peningkatan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
404	1.03.000714	Peningkatan Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
405	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	1,2
406	1.03.000716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	NA
407	1.03.000717	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	NA
408	1.03.000718	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	NA
409	1.03.000719	Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
410	1.03.000720	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
411	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	4,93
412	1.03.000722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	3
413	1.03.000723	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	NA
414	1.03.000724	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	NA
415	1.03.000725	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Titik	NA
416	1.03.000726	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
417	1.03.000727	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	NA
418	1.03.000731	Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	NA
419	1.03.000733	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Km	NA
420	1.03.000734	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Km	0,707
421	1.03.000735	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	NA
422	1.03.000736	Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku	m ³ /detik	NA

1	2	3	4	5
423	1.03.000737	Jumlah Pembangunan Bendung Pengendali Banjir	Unit	NA
424	1.03.000738	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Situ	SITU	NA
425	1.03.000739	Jumlah Paket Pekerjaan	Paket	272
426	1.03.000740	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	NA
427	1.03.000741	Panjang Drainase Perkotaan	Km	NA
428	1.03.000742	Jumlah kawasan rawa	Kawasan Rawa	NA
429	1.03.000744	Pengamanan Mata Air	Titik	NA
430	1.03.000745	Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	NA
431	1.03.000746	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	2
432	1.03.000747	Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	NA
433	1.03.000748	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	NA
434	1.03.000749	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	84,16
435	1.03.0910102	Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
436	1.03.910102	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
437	1.03.910103	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
438	1.03.910104	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
439	1.03.910105	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
440	1.03.910106	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
441	1.03.910107	Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
442	1.03.910108	Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
443	1.03.910109	Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
444	1.03.910111	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
445	1.03.910112	Jumlah SDM Pengelola Persampahan	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
446	1.03.910116	Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	NA
447	1.03.910117	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	3160
448	1.03.910120	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	34
449	1.03.910122	Sambungan Rumah Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	NA
450	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	NA
451	1.03.910126	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Paket	NA
452	1.03.910127	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD	Jiwa	2232
453	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	NA
454	1.03.910129	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
455	1.03.910130	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	NA (Bukan kewenangan DPU)
456	1.03.910131	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	NA
457	1.03.910132	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
458	1.03.910134	Rekomendasi atas Fasilitas forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
459	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	NA (Bukan kewenangan DPU)
460	1.03.910136	Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara	NA (Bukan kewenangan DPU)
461	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
462	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
463	1.03.910139	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan	NA (Bukan kewenangan DPU)
464	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan	NA (Bukan kewenangan DPU)
465	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan	NA (Bukan kewenangan DPU)
466	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	NA (Bukan kewenangan DPU)
467	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	NA (Bukan kewenangan DPU)
468	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
469	1.03.910149	Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	NA
470	1.03.910150	SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	NA
471	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta	NA (Bukan kewenangan DPU)

1	2	3	4	5
472	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	NA (Bukan kewenangan DPU)
473	1.03.910156	Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
474	1.03.910157	Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7
475	1.03.910158	Jumlah Bangunan Sabo	Unit	NA
476	1.03.910160	Jumlah Dokumen Outline Plan	Dokumen	NA
477	1.03.910161	Jumlah Kawasan Genangan	Kawasan Genangan	NA
478	1.03.910162	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Orang	NA
479	1.03.910163	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	NA
480	1.03.910164	Panjang Saluran Drainase Perkotaan	Meter	NA
481	1.03.910165	Jumlah Kawasan Rawa	Kawasan Rawa	0
482	1.03.910167	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan	Jiwa	NA (Bukan kewenangan DPU)
483	1.03.910168	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Unit	NA
484	1.03.910169	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan	Dokumen	NA
485	1.03.910170	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	Meter	394
486	1.03.910171	Jumlah Rumah Sehat	Rumah	NA (Bukan kewenangan DPU)
487	1.03.910172	Jumlah Rumah Layak Huni	Rumah	NA (Bukan kewenangan DPU)
488	1.03.910174	Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.17.000001	Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2
2	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	111
3	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
4	2.17.000004	Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	36
5	2.17.000006	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	3
6	2.17.000007	Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2
7	2.17.000008	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
8	2.17.000010	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2
9	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	160
10	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
11	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jati diri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	160
12	2.17.000021	Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	5
13	2.17.000022	Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	160
14	2.17.000023	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
15	2.17.000024	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
16	2.17.000025	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0
17	2.17.000026	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	111

1	2	3	4	5
18	2.17.000027	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
19	2.17.000028	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	0
20	2.17.000029	Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	0
21	2.17.000030	Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0
22	2.17.000031	Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	0
23	2.17.000032	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
24	2.17.000033	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	240
25	2.17.000034	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	100
26	2.17.000035	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	NA (Kriteria Usaha belum terpenuhi)
27	2.17.000036	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM	Unit Usaha	35
28	2.17.000037	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi	Unit Usaha	35
29	2.17.000038	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	NA (Kriteria Usaha belum terpenuhi)
30	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	45
31	2.17.000042	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
32	2.17.000045	Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan	Unit Usaha	100
33	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	688
34	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
35	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	688

1	2	3	4	5
36	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
37	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	1256
38	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif, bernilai Tambah	Unit Usaha	1256
39	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
40	2.17.000054	Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	120
41	2.17.000055	Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	200
42	2.17.000056	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	160

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Perdagangan

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.30.000001	Agen dan Pasar Rakyat	Unit	45
2	3.30.000010	Distributor B2	Orang	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
3	3.30.000014	fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
4	3.30.000015	Gudang yang telah terdaftar	Unit	22
5	3.30.000019	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	27
6	3.30.000020	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	28
7	3.30.000021	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
8	3.30.000022	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kegiatan	1
9	3.30.000023	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Kegiatan	17
10	3.30.000024	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kegiatan	20
11	3.30.000025	Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	27
12	3.30.000026	Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Kegiatan	NA
13	3.30.000029	Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kegiatan	NA
14	3.30.000044	Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Lokasi	5
15	3.30.000045	Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
16	3.30.000046	Pameran Dagang Lokal yang Diikuti	Kegiatan	1
17	3.30.000047	Pameran Dagang Nasional yang Diikuti	Kegiatan	2

1	2	3	4	5
18	3.30.000048	Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	NA
19	3.30.000049	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Unit	4
20	3.30.000053	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
21	3.30.000054	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
22	3.30.000057	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
23	3.30.000058	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
24	3.30.000060	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
25	3.30.000061	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kegiatan	50
26	3.30.000062	Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
27	3.30.000063	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Kegiatan	54
28	3.30.000064	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Kegiatan	0
29	3.30.000065	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Kegiatan	54
30	3.30.000066	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Kegiatan	30
31	3.30.000067	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Pelaku Usaha	180

1	2	3	4	5
32	3.30.000068	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Unit	NA
33	3.30.000070	Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha	2
34	3.30.000071	Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2
35	3.30.000073	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kegiatan	82
36	3.30.000074	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	82
37	3.30.000075	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
38	3.30.000076	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace	Kegiatan	1
39	3.30.000077	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
40	3.30.000078	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
41	3.30.000079	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	4
42	3.30.000080	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	5
43	3.30.000081	Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kegiatan	10
44	3.30.000082	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
45	3.30.000083	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)

1	2	3	4	5
46	3.30.000084	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
47	3.30.000085	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kegiatan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
48	3.30.000091	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaku Usaha	14000
49	3.30.000092	Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	Orang	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
50	3.30.000094	Produk Unggulan Daerah	Produk	5
51	3.30.000096	Produsen B2 (P-B2)	Orang	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
52	3.30.000097	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	2
53	3.30.000098	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan	Unit	NA
54	3.30.000099	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Unit	50
55	3.30.000102	Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	10
56	3.30.000103	Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	48
57	3.30.000104	Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Unit	NA
58	3.30.000107	Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	7
59	3.30.000108	UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	54043
60	3.30.000109	Verifikasi Dokumen sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kegiatan	1

61	3.30.000110	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenihan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kegiatan	0
----	-------------	--	----------	---

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Perindustrian

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.31.000001	BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Laporan	NA (Tidak ada permohonan kawasan industri)
2	3.31.000002	Evaluasi pemenuhan komitmen usaha	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
3	3.31.000003	Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
4	3.31.000004	Hasil pelaksanaan RPIK	Laporan	1
5	3.31.000006	Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan	Laporan	53
6	3.31.000007	Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
7	3.31.000008	Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri	Laporan	53
8	3.31.000009	Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
9	3.31.000010	Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
10	3.31.000011	Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
11	3.31.000012	Pelaksanaan kegiatan sistem Pendukung Keputusan	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
12	3.31.000013	Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah	Laporan	8
13	3.31.000014	Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
14	3.31.000015	Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM	Laporan	8
15	3.31.000016	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	Laporan	8
16	3.31.000017	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Laporan	1

1	2	3	4	5
17	3.31.000018	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
18	3.31.000019	Pembangunan kawasan industri	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
19	3.31.000020	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
20	3.31.000021	Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
21	3.31.000022	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
22	3.31.000023	Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
23	3.31.000024	Pengembangan kawasan peruntukan industri	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
24	3.31.000025	Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	Laporan	1
25	3.31.000026	Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
26	3.31.000027	Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun	Dokumen	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
27	3.31.000029	Penyediaan Informasi dan Analisa Industri	Laporan	1
28	3.31.000030	Penyediaan sumber pembiayaan	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
29	3.31.000031	Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
30	3.31.000032	Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri	Laporan	53
31	3.31.000033	Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)

1	2	3	4	5
32	3.31.000034	Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan	Laporan	3337
33	3.31.000036	Standardisasi industri	Dokumen	1
34	3.31.000037	Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	Laporan	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
35	3.31.000038	Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri	Laporan	53
36	3.31.000039	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota	Data	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
37	3.31.000040	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
38	3.31.000041	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota	Data	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
39	3.31.000042	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
40	3.31.000043	Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data	1
41	3.31.000044	Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
42	3.31.000045	Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
43	3.31.000046	Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
44	3.31.000047	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi	Data	1256

1	2	3	4	5
45	3.31.000048	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	1256
46	3.31.000049	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	1256
47	3.31.000050	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	1256
48	3.31.000051	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan	Data	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
49	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
50	3.31.000053	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional	Data	1256
51	3.31.000054	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
52	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
53	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
54	3.31.000057	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
55	3.31.000058	Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
56	3.31.000059	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
57	3.31.000060	Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
58	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	Data	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
59	3.31.000062	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota	Data	53
60	3.31.000063	Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	1

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.15.000000	Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	NA
2	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	42
3	2.15.000004	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	510
4	2.15.000005	Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	500
5	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	360
6	2.15.000007	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	300
7	2.15.000008	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi	Unit	9
8	2.15.000009	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	Unit	9
9	2.15.000010	Analisis dampak lalu lintas	Dokumen	NA
10	2.15.000011	Analisis mengenai dampak lingkungan	Dokumen	NA
11	2.15.000018	Buku kerja rancang bangun	Dokumen	NA
12	2.15.000020	Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
13	2.15.000023	Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	NA
14	2.15.000026	Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab/kota yang sudah ditetapkan	Dokumen	NA
15	2.15.000027	Data jalur	Jalur	NA
16	2.15.000028	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
17	2.15.000029	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan	Dokumen	NA
18	2.15.000034	Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
19	2.15.000037	Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	NA
20	2.15.000040	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
21	2.15.000046	Data Audit Terminal	Dokumen	6
22	2.15.000047	Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1
23	2.15.000059	Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
24	2.15.000060	Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
25	2.15.000061	Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	1
26	2.15.000063	Data fasilitas operasi	Unit	NA
27	2.15.000064	Data fasilitas penunjang	Unit	NA
28	2.15.000067	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	6
29	2.15.000068	Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	6
30	2.15.000071	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	NA
31	2.15.000072	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	6
32	2.15.000073	Data frekuensi/lalu lintas	Kali	NA
33	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	Dokumen	6
34	2.15.000075	Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1
35	2.15.000077	Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
36	2.15.000078	Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota	Unit	NA

1	2	3	4	5
37	2.15.000079	Data jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan	Unit	NA
38	2.15.000080	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
39	2.15.000082	Data kapasitas, frekuensi, dan headway	Kali	NA
40	2.15.000085	Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
41	2.15.000086	Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	NA
42	2.15.000087	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	11862
43	2.15.000088	Data kereta api yang melintas (kereta api yang menjalani lintas pelayanan dan kereta api yang lintas pelayanannya berhimpit)	Unit	NA
44	2.15.000090	Data Laporan Angkutan Laut Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
45	2.15.000092	Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
46	2.15.000094	Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
47	2.15.000099	Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	NA
48	2.15.000111	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan	Laporan	NA
49	2.15.000112	Data nama-nama kereta api (sifat dan jenis pelayanan dan jenis angkutan)	Laporan	NA
50	2.15.000114	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	NA
51	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	NA
52	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	NA
53	2.15.000117	Data pelayanan angkutan barang	Unit	NA
54	2.15.000118	Data pelayanan angkutan orang	Unit	NA
55	2.15.000120	Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat	Dokumen	0
56	2.15.000121	Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki	Dokumen	0
57	2.15.000124	Data penetapan jalur kereta api khusus	Dokumen	NA
58	2.15.000125	Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
59	2.15.000126	Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan	Dokumen	NA
60	2.15.000127	Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen	NA
61	2.15.000128	Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus	Dokumen	0
62	2.15.000130	Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan	Dokumen	1
63	2.15.000131	Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan	Dokumen	1
64	2.15.000136	Data perizinan Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
65	2.15.000137	Data perizinan pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang sudah ditetapkan	Dokumen	NA
66	2.15.000138	Data perizinan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang diterbitkan	Dokumen	NA
67	2.15.000139	Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
68	2.15.000140	Data perizinan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang telah diberikan	Dokumen	0
69	2.15.000142	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	1
70	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	1
71	2.15.000144	Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	1
72	2.15.000146	Data permohonan izin pembangunan	Dokumen	NA
73	2.15.000148	Data persetujuan prinsip pembangunan	Dokumen	NA
74	2.15.000149	Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	Dokumen	NA
75	2.15.000151	Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota	Dokumen	0
76	2.15.000153	Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota	Dokumen	1

1	2	3	4	5
77	2.15.000156	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1
78	2.15.000158	Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
79	2.15.000160	Data rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi	Unit	NA
80	2.15.000162	Data rencana kebutuhan sumber daya manusia	Orang	NA
81	2.15.000163	Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
82	2.15.000165	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting	Dokumen	NA
83	2.15.000166	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting	Dokumen	NA
84	2.15.000167	Data rencanan induk pelabuhan kab/kota yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
85	2.15.000168	Data Ruang Lalu Lintas	Dokumen	NA
86	2.15.000172	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C	Dokumen	NA
87	2.15.000173	Data Terminal	Dokumen	NA
88	2.15.000176	Data Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	NA
89	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	1
90	2.15.000178	Data UPPKB	Dokumen	0
91	2.15.000180	Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	NA
92	2.15.000181	Dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api	Dokumen	NA
93	2.15.000183	Dokumen Kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian	Regulasi	NA
94	2.15.000184	Dokumen pemenuhan persyaratan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	NA
95	2.15.000187	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	NA
96	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	NA
97	2.15.000190	Dokumentasi sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	NA
98	2.15.000191	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan	Unit	0

1	2	3	4	5
99	2.15.000192	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	0
100	2.15.000193	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat	Unit	1
101	2.15.000194	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	1
102	2.15.000196	hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan.	Dokumen	NA
103	2.15.000197	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	Dokumen	NA
104	2.15.000199	Jarak Pelayanan	Dokumen	NA
105	2.15.000200	Kajian rencana induk bandar udara	Dokumen	NA
106	2.15.000201	Kebutuhan angkutan (demanci);	Dokumen	0
107	2.15.000202	Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan	Dokumen	0
108	2.15.000203	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	NA
109	2.15.000204	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	Laporan	NA
110	2.15.000205	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	NA
111	2.15.000206	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus	Laporan	NA
112	2.15.000207	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	NA
113	2.15.000208	Laporan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	NA
114	2.15.000209	Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Laporan	NA
115	2.15.000210	Marka Jalan	Unit	51590
116	2.15.000211	Marka Jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	48760
117	2.15.000215	Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan	Dokumen	1
118	2.15.000218	Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb;	Dokumen	NA
119	2.15.000219	persyaratan administratif	Dokumen	NA
120	2.15.000221	Potensi Perekonomian daerah	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
121	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	1624
122	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	987
123	2.15.000226	Rancang Bangun	Dokumen	NA
124	2.15.000227	Rekomendasi dari bupati/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten/kota	Dokumen	NA
125	2.15.000228	Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;	Dokumen	NA
126	2.15.000231	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .	Dokumen	NA
127	2.15.000232	Rencana induk terminal	Dokumen	NA
128	2.15.000238	rencana umum tata ruang;	Dokumen	NA
129	2.15.000239	Salinan dokumen perjanjiankonsesi perusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015;	Dokumen	NA
130	2.15.000243	Tarif pelayanan dasar	Dokumen	NA
131	2.15.000244	Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi	Orang	NA
132	2.15.000245	Marka Jalan	Meter	51590
133	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	0
134	2.15.000247	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas	Dokumen	0
135	2.15.000248	Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang	Dokumen	0
136	2.15.000249	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan	Dokumen	0
137	2.15.000251	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan	Dokumen	NA
138	2.15.000253	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas	Dokumen	10
139	2.15.000254	Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	Dokumen	NA
140	2.15.000255	Trotoar	M2	0
141	2.15.000256	Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas	Dokumen	0
142	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	0
143	2.15.000258	Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Dokumen	NA
144	2.15.000259	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	NA
145	2.15.000260	Persetujuan Teknis Hasil Andalalin	Dokumen	NA
146	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	NA

1	2	3	4	5
147	2.15.000262	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan	Dokumen	NA
148	2.15.000263	Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.	Dokumen	NA
149	2.15.000264	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS	Dokumen	NA
150	2.15.000265	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS	Dokumen	NA
151	2.15.000266	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi	Orang	NA
152	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	3
153	2.15.000268	Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit	3
154	2.15.000269	Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	0
155	2.15.000270	Halte	Unit	9
156	2.15.000271	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	Unit	31
157	2.15.000272	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	NA
158	2.15.000273	Laporan Pengawasan ketertiban terminal	Laporan	NA
159	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan	Unit	3108
160	2.15.000275	Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	NA
161	2.15.000276	Data Prasarana Jalan	Dokumen	1
162	2.15.000277	Penetapan Tipe dan Kelas Terminal	Dokumen	NA
163	2.15.000278	Dokumen Pemeriksaan terhadap Administrasi Kendaraan	Dokumen	0
164	2.15.000279	Data sarana perkeretaapian	Unit	NA
165	2.15.000280	Laporan pengawasan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	Laporan	NA
166	2.15.000281	Data pelayanan angkutan orang	Laporan	NA
167	2.15.000283	Data jumlah dan asal tujuan penumpang menuju bandara	Dokumen	NA
168	2.15.000285	bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan	Dokumen	NA
169	2.15.000286	Data izin pembangunan	Dokumen	NA
170	2.15.000287	Data izin operasi	Dokumen	NA
171	2.15.000288	Laporan pengawasan penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Laporan	NA
172	2.15.000289	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	NA
173	2.15.000290	Data jumlah barang	Unit	NA
174	2.15.000291	Data jumlah penumpang	Orang	NA
175	2.15.000292	Data jumlah jalur	Jalur	NA

1	2	3	4	5
176	2.15.000294	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual	Unit	6
177	2.15.000295	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang	Kejadian	0
178	2.15.000296	dokumen penetapan lokasi Bandar Udara	Dokumen	NA
179	2.15.000297	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital	Unit	NA
180	2.15.000298	dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara	Dokumen	NA
181	2.15.000300	Komponen Perhitungan Tarif Kelas Ekonomi	Dokumen	NA
182	2.15.000301	persetujuan lingkungan	Dokumen	NA
183	2.15.000302	Data Infrastruktur Penunjang	Unit	NA
184	2.15.000304	Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan	Kejadian	0
185	2.15.000305	Grosse akta kapal	Dokumen	NA
186	2.15.000306	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	Orang	NA
187	2.15.000307	Surat ukur kapal yang masih berlaku	Dokumen	25
188	2.15.000308	Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku	Dokumen	NA
189	2.15.000309	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua	Orang	NA
190	2.15.000310	Data awak kapal	Dokumen	NA
191	2.15.000311	Data Komponen substantif	Dokumen	NA
192	2.15.000312	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
193	2.15.000313	Jumlah perlintasan sebidang	Lokasi	27
194	2.15.000314	Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500	Unit	NA
195	2.15.000315	Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7	Unit	NA
196	2.15.000316	Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Dokumen	NA
197	2.15.000320	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	11862
198	2.15.000321	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	2000
199	2.15.000322	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	NA
200	2.15.000323	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
201	2.15.000324	Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	Unit	NA

1	2	3	4	5
202	2.15.000325	Dokumen sertifikasi pengawakan	Dokumen	NA
203	2.15.000326	Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran	Orang	NA
204	2.15.000327	Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha	Dokumen	NA
205	2.15.000328	Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri	Dokumen	NA
206	2.15.000329	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi	Dokumen	NA
207	2.15.000330	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi	Dokumen	NA
208	2.15.000332	Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Dokumen	NA
209	2.15.000333	Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Dokumen	NA
210	2.15.000342	Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau	Dokumen	NA
211	2.15.000343	Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Orang	NA
212	2.15.000346	Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau	Unit	NA
213	2.15.000347	BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	NA
214	2.15.000348	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
215	2.15.000349	Data Fasilitas Pelabuhan	Dokumen	NA
216	2.15.000350	Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit	NA
217	2.15.000351	Perjanjian konsesi perusahaan	Dokumen	NA
218	2.15.000353	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau	Dokumen	1
219	2.15.000354	Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	NA
220	2.15.000355	Data Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	NA
221	2.15.000356	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan	Dokumen	0
222	2.15.000357	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	NA
223	2.15.000358	Unit Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan	Unit	NA
224	2.15.000359	BAST P3D Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	NA
225	2.15.000363	Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan	Regulasi	NA
226	2.15.000365	Data Komponen penunjang	Dokumen	NA
227	2.15.000373	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	NA
228	2.15.000376	SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
229	2.15.000380	Data daerah lingkungan kepentingan	Dokumen	NA
230	2.15.000381	Tahapan pelaksanaan pembangunan	Dokumen	NA
231	2.15.000383	Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo	Dokumen	NA
232	2.15.000386	Kebutuhan fasilitas	Unit	NA
233	2.15.000387	Tata letak fasilitas	Dokumen	NA
234	2.15.000388	Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan	Laporan	NA
235	2.15.000390	Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau	Laporan	NA
236	2.15.000391	Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danau	Dokumen	NA
237	2.15.000393	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	0
238	2.15.000394	Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen	0
239	2.15.000395	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Laporan	NA
240	2.15.000397	Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara	Dokumen	NA
241	2.15.000398	Rencana Tata Ruang Wilayah	Dokumen	NA
242	2.15.000399	Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan	Laporan	NA
243	2.15.000400	Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen	NA
244	2.15.000402	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian	Laporan	NA
245	2.15.000403	Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Laporan	0
246	2.15.000404	Pemeliharaan Fasilitas	Unit	NA
247	2.15.000405	Rencana Pengadaan Tanah	Dokumen	NA
248	2.15.000406	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1
249	2.15.000407	Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	NA
250	2.15.000408	Data penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Dokumen	1
251	2.15.000409	Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji	Dokumen	1

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.13.000001	Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	784
2	2.13.000008	Buku Register Desa	Dokumen	196
3	2.13.000009	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	194
4	2.13.000010	Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan	Dokumen	1
5	2.13.000012	Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa	Desa	NA
6	2.13.000013	Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	Desa	196
7	2.13.000014	Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Dokumen	1
8	2.13.000016	Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
9	2.13.000017	Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1
10	2.13.000018	Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	NA
11	2.13.000020	Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen	NA
12	2.13.000023	Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	215
13	2.13.000025	Dokumen pengelolaan keuangan desa	Dokumen	980
14	2.13.000027	Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain	Dokumen	NA
15	2.13.000029	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	Dokumen	196
16	2.13.000034	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1
17	2.13.000035	Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1
18	2.13.000042	Laporan penyelenggaraan musyawarah desa	Laporan	1
19	2.13.000043	lembaga adat di Kabupaten/Kota	Lembaga Adat	NA
20	2.13.000044	Lembaga adat di Provinsi	Lembaga Adat	NA
21	2.13.000045	Musyawarah Desa	Dokumen	4

1	2	3	4	5
22	2.13.000058	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	Peraturan Desa	784
23	2.13.000059	Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis	Dokumen	8
24	2.13.000060	Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat	Desa	NA
25	2.13.000064	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	196
26	2.13.000065	Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	NA
27	2.13.000066	Peta desa	Dokumen	NA
28	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	NA
29	2.13.000071	SDM anggota BPD	Orang	980
30	2.13.000073	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	13
31	2.13.000074	Tingkat perkembangan desa	Desa	26

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	218011
2	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	36871
3	2.19.000067	Pemuda wirausaha muda pemula	Orang	23718
4	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	
5	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	3
6	2.19.000070	sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	1
7	2.19.000071	organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	
8	2.19.000072	sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	2
9	2.19.000073	atlet/olahragawan talenta muda	Orang	
10	2.19.000075	atlet/olahragawan disabilitas	Orang	
11	2.19.000076	kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	
12	2.19.000078	kompetisi/kejuaraan single event		
13	2.19.000081	pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	
14	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	NA
15	2.19.000083	wasit	Orang	NA
16	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	
17	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	
18	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	
19	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	
20	2.19.000088	prasarana olahraga disabilitas	Unit	
21	2.19.000089	organisasi kepramukaan	Organisasi	
22	2.19.000090	tenaga pendidik pramuka	Orang	
23	2.19.000091	kegiatan pramuka	Orang	

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Pariwisata

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.26.000004	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Lokasi	5
2	3.26.000005	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	
3	3.26.000013	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	1
4	3.26.000017	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1
5	3.26.000019	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1
6	3.26.000020	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	
7	3.26.000021	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	
8	3.26.000022	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	
9	3.26.000023	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri	Dokumen	
10	3.26.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	
11	3.26.000027	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri	Dokumen	
12	3.26.000031	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri	Dokumen	6
13	3.26.000032	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri	Dokumen	
14	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	6
15	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	
16	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	
17	3.26.000036	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri	Dokumen	
18	3.26.000044	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1
19	3.26.000046	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1

1	2	3	4	5
20	3.26.000072	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1
21	3.26.000144	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	2
22	3.26.000145	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	2
23	3.26.000159	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1
24	3.26.000162	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	
25	3.26.000163	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata	Data	
26	3.26.000165	Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan	Data	
27	3.26.000166	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	
28	3.26.000167	Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota	Dokumen	
29	3.26.000168	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	
30	3.26.000169	Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf	Dokumen	
31	3.26.000171	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	5
32	3.26.000172	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Dokumen	1
33	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	
34	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	
35	3.26.000178	Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	1
36	3.26.000180	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	
37	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	5
38	3.26.000182	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	5
39	3.26.000184	Kawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan	Kawasan	1
40	3.26.000185	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu	Dokumen	1
41	3.26.000188	Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota	Dokumen	

1	2	3	4	5
42	3.26.000189	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	4
43	3.26.000193	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota	Dokumen	
44	3.26.000195	Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko	Kegiatan Usaha	
45	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	1
46	3.26.000199	Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Unit	
47	3.26.000200	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	5
48	3.26.000201	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Unit	5
49	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	1
50	3.26.000204	Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan	Dokumen	1
51	3.26.000206	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu	Dokumen	
52	3.26.000210	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dokumen	1
53	3.26.000212	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	9
54	3.26.000214	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	9
55	3.26.000217	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	300
56	3.26.000218	Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	7
57	3.26.000221	Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	7
58	3.26.000222	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	300
59	3.26.000225	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Orang	9

1	2	3	4	5
60	3.26.000226	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	9
61	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	2
62	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	100
63	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	100
64	3.26.000240	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Orang	
65	3.26.000245	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen	
66	3.26.000246	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	
67	3.26.000247	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	
68	3.26.000248	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Orang	
69	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	
70	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	
71	3.26.000253	ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	100
72	3.26.000259	Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	
73	3.26.000260	Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Orang	
74	3.26.000261	Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf	Data	

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.23.000095	Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1
2	2.23.000096	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	n/a
3	2.23.000097	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota	Perpustakaan	n/a
4	2.23.000098	Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	n/a
5	2.23.000099	Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	553
6	2.23.000100	Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	91
7	2.23.000101	Perpustakaan Kecamatan	Perpustakaan	3
8	2.23.000102	Perpustakaan Kelurahan/Desa	Perpustakaan	208
9	2.23.000103	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	123344
10	2.23.000104	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	n/a
11	2.23.000105	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Orang	n/a
12	2.23.000106	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Orang	n/a
13	2.23.000107	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan	Orang	n/a
14	2.23.000108	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan	Orang	n/a
15	2.23.000109	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Judul	50062
16	2.23.000110	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Judul	n/a
17	2.23.000111	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Judul	n/a
18	2.23.000112	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Judul	n/a
19	2.23.000113	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan	Judul	6444

1	2	3	4	5
20	2.23.000114	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan	Judul	n/a
21	2.23.000115	Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota	naskah	n/a
22	2.23.000116	Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota	Eksemplar	n/a
23	2.23.000117	koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota		n/a
24	2.23.000118	koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	Eksemplar	n/a
25	2.23.000119	Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota	Kegiatan	5
26	2.23.000120	Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
27	2.23.000121	Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
28	2.23.000122	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	n/a
29	2.23.000123	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
30	2.23.000124	Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
31	2.23.000125	Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
32	2.23.000126	Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	4
33	2.23.000127	Pustakawan pada Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
34	2.23.000128	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	n/a
35	2.23.000129	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
36	2.23.000130	Pustakawan pada Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
37	2.23.000131	Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
38	2.23.000132	Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	22700
39	2.23.000133	Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
40	2.23.000134	Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
41	2.23.000135	Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a

1	2	3	4	5
42	2.23.000136	Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
43	2.23.000137	Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	n/a
44	2.23.000138	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Orang	1660
45	2.23.000139	Penggiat literasi binaan kabupaten/kota	Orang	31
46	2.23.000140	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	n/a
47	2.23.000141	Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	22

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Kearsipan

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	97
2	2.24.000002	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	n/a
3	2.24.000005	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	10719
4	2.24.000006	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	10719
5	2.24.000007	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	n/a
6	2.24.000013	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	n/a
7	2.24.000015	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	608
8	2.24.000016	Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	n/a
9	2.24.000017	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	n/a
10	2.24.000018	Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	n/a
11	2.24.000019	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	n/a
12	2.24.000020	Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Arsip	n/a
13	2.24.000021	Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	n/a
14	2.24.000027	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	18

1	2	3	4	5
15	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	512
16	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	10000
17	2.24.000032	Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	n/a
18	2.24.000034	SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP	1
19	2.24.000035	Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota	Arsip	n/a
20	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	3

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.12.000001	Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	12
2	2.12.000002	Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Dokumen	N/A
3	2.12.000003	Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	N/A
4	2.12.000004	Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	Dokumen	N/A
5	2.12.000005	Data yang telah diolah dan disajikan	Dokumen	3
6	2.12.000006	Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	N/A
7	2.12.000008	Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	3
8	2.12.000009	Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
9	2.12.000010	Dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	N/A
10	2.12.000012	Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	N/A
11	2.12.000017	Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	N/A
12	2.12.000020	Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
13	2.12.000023	Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting	Dokumen	34596

1	2	3	4	5
14	2.12.000024	Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen	N/A
15	2.12.000025	Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	774
16	2.12.000026	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	N/A
17	2.12.000027	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
18	2.12.000028	Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
19	2.12.000032	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Paket	N/A
20	2.12.000033	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dokumen	N/A
21	2.12.000034	Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	N/A
22	2.12.000035	Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	44
23	2.12.000037	Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	247846
24	2.12.000039	Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Dokumen	N/A
25	2.12.000040	Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
26	2.12.000042	Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	N/A
27	2.12.000044	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	N/A

1	2	3	4	5
28	2.12.000046	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	3
29	2.12.000047	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Dokumen	N/A
30	2.12.000050	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dokumen	N/A
31	2.12.000051	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Dokumen	N/A
32	2.12.000052	Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	N/A
33	2.12.000053	Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	N/A
34	2.12.000056	Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Laporan	N/A
35	2.12.000057	Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	N/A
36	2.12.000060	Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Laporan	N/A
37	2.12.000062	Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	N/A
38	2.12.000063	Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	N/A
39	2.12.000067	Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	N/A
40	2.12.000068	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	N/A

1	2	3	4	5
41	2.12.000069	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	N/A
42	2.12.000071	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	N/A
43	2.12.000072	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	N/A
44	2.12.000073	Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	N/A
45	2.12.000074	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	N/A
46	2.12.000076	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan	Laporan	N/A
47	2.12.000077	Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	12
48	2.12.000078	Laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Laporan	N/A
49	2.12.000079	Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	N/A
50	2.12.000081	Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	N/A
51	2.12.000085	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk	Laporan	N/A
52	2.12.000086	Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan	Laporan	N/A
53	2.12.000087	Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	N/A

1	2	3	4	5
54	2.12.000088	Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	N/A
55	2.12.000089	Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan	12
56	2.12.000090	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	N/A
57	2.12.000091	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil	Orang	N/A
58	2.12.000092	penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Orang	N/A
59	2.12.000094	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Laporan	N/A
60	2.12.000095	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	N/A
61	2.12.000096	Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	N/A
62	2.12.000097	Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Faskes	N/A
63	2.12.000098	Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Kali	N/A
64	2.12.000099	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	Kali	N/A
65	2.12.000100	Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak		N/A

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	40
2	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	40
3	2.18.000003	Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	NA
4	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	15522
5	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	NA
6	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	1270
7	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	NA
8	2.18.000010	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;	Orang	0
9	2.18.000013	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;	Orang	12168
10	2.18.000014	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.	Orang	NA
11	2.18.000016	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;	Orang	15522
12	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	15522
13	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	1
14	2.18.000021	Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	NA
15	2.18.000026	peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	NA
16	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	NA
17	2.18.000028	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Dokumen	1
18	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	28
19	2.18.000031	Rencana Minat Investasi di luar negeri.	Dokumen	0

1	2	3	4	5
20	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	150
21	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	440
22	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	NA
23	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	NA
24	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	NA
25	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	NA
26	2.18.000041	Jumlah Gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Sudah Berizin	Gerai	8
27	2.18.000042	Jumlah Gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Belum Berizin	Gerai	NA
28	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.06.000007	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	334
2	1.06.000008	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	9
3	1.06.000009	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	334
4	1.06.000018	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	334
5	1.06.000020	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	334
6	1.06.000021	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2
7	1.06.000022	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	334
8	1.06.000023	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	16
9	1.06.000024	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	9
10	1.06.000025	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Orang	334
11	1.06.000028	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	Orang	334
12	1.06.000029	Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan	Orang	16
13	1.06.000031	Fakir Miskin	Orang	83791
14	1.06.000034	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	50
15	1.06.000038	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	10
16	1.06.000039	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	226
17	1.06.000040	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	67
18	1.06.000041	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	226
19	1.06.000042	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	226
20	1.06.000043	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	159

1	2	3	4	5
21	1.06.000044	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	226
22	1.06.000047	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	226
23	1.06.000052	Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	1
24	1.06.000054	keluarga pada KAT	Keluarga	NA (Kewenangan Pusat)
25	1.06.000055	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	33628
26	1.06.000059	kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Dokumen	1
27	1.06.000065	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah	Dokumen	1
28	1.06.000067	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan	30
29	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	59
30	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	59
31	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	59
32	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	59
33	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanaan dalam masa tanggap darurat	Orang	59
34	1.06.000074	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1
35	1.06.000075	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	463
36	1.06.000081	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	463
37	1.06.000083	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	463
38	1.06.000084	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	5
39	1.06.000085	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	463

1	2	3	4	5
40	1.06.000086	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	7
41	1.06.000087	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	205
42	1.06.000088	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	1
43	1.06.000089	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	463
44	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	17
45	1.06.000091	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	1
46	1.06.000093	Makam Pahlawan Nasional	Makam	1
47	1.06.000094	orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	131
48	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20
49	1.06.000098	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	20
50	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	799
51	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	6
52	1.06.000102	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	6
53	1.06.000103	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	1
54	1.06.000110	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8
55	1.06.000111	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	21
56	1.06.000112	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	21
57	1.06.000113	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	212
58	1.06.000115	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	3
59	1.06.000116	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	994
60	1.06.000117	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	30

1	2	3	4	5
61	1.06.000118	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	50
62	1.06.000119	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	994
63	1.06.000122	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	111
64	1.06.000128	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
65	1.06.000129	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
66	1.06.000130	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu	Orang	25
67	1.06.000132	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
68	1.06.000133	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
69	1.06.000134	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
70	1.06.000135	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
71	1.06.000136	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	NA (Kewenangan Pusat)

1	2	3	4	5
72	1.06.000137	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
73	1.06.000138	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Rujukan	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
74	1.06.000139	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
75	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	1
76	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	1
77	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	20
78	1.06.000169	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	47
79	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	45

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	541170
2	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	74
3	2.07.000005	CPMI/PMI	Orang	500
4	2.07.000018	Instruktur pemerintah	Orang	20
5	2.07.000019	Instruktur swasta	Orang	9
6	2.07.000024	Kapasitas terpasang pemerintah	Orang	960
7	2.07.000029	kecelakaan kerja	Kasus	NA
8	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	70
9	2.07.000035	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit	2
10	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	9
11	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga	1
12	2.07.000042	LPKS yang dibina	Lembaga	1
13	2.07.000046	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	423
14	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	NA
15	2.07.000048	Mediator	Orang	2
16	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	Program	30
17	2.07.000053	Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan	Orang	500
18	2.07.000056	Pencari Kerja	Orang	5000
19	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	Orang	6017
20	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang	5373
21	2.07.000059	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	929
22	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	790309
23	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	11
24	2.07.000074	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen	91
25	2.07.000077	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen	23
26	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	11
27	2.07.000080	Persediaan Tenaga Kerja	Orang	20963
28	2.07.000082	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	NA
29	2.07.000084	Perusahaan Kecil	Perusahaan	467
30	2.07.000086	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	Perusahaan	562
31	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	321
32	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	NA
33	2.07.000095	Petugas Antar Kerja	Orang	2
34	2.07.000096	PMI Purna	Orang	10

1	2	3	4	5
35	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Ten aga Kerja	NA
36	2.07.000102	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	2
37	2.07.000109	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	100
38	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	19552
39	2.07.000114	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Orang	16
40	2.07.000123	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA

Bidang Urusan : Pemerintah Bidang Transmigrasi

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.32.	Jumlah KK transmigrasi yang dibina	Kepala Keluarga	1
2	3.32.000001	Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan	Lokasi	1
3	3.32.000002	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Kepala Keluarga	8
4	3.32.000003	Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan	Orang	2
5	3.32.000004	Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan	Kepala Keluarga	2
6	3.32.000005	Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Kepala Keluarga	1
7	3.32.000006	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	2
8	3.32.000007	Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi	Dokumen	1
9	3.32.000008	Data KK asal dan tujuan	Kepala Keluarga	1
10	3.32.000009	Data bangunan yang dimiliki	Unit	1
11	3.32.000010	Data KK yg beradaptasi	Kepala Keluarga	1
12	3.32.000011	Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina	Kepala Keluarga	1
13	3.32.000012	Data KK yg ikut pelatihan	Orang	2
14	3.32.000013	Data KK yg ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	2
15	3.32.000014	Data SP pemantapan dan SP penguatan	Satuan Permukiman (SP)	1
16	3.32.000015	Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunian	Dokumen	NA
17	3.32.000016	Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	NA
18	3.32.000017	Dokumen Hasil Identifikasi	Dokumen	NA
19	3.32.000018	Dokumen usulan pencadangan tanah	Dokumen	NA
20	3.32.000019	Jenis Materi pelatihan	Materi	3
21	3.32.000020	Jenis materi penyuluhan	Materi	3
22	3.32.000021	Jenis Sarpras yang belum memenuhi kriteria	Unit	NA
23	3.32.000022	Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteria	Unit	6
24	3.32.000023	Data kabupaten yg berpotensi jd calon kawasan transmigrasi, luasannya brp, jumlah KK	Dokumen	NA
25	3.32.000024	Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi	Dokumen	NA
26	3.32.000025	Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws trans	Kasus	0
27	3.32.000026	Kasus yang tidak dapat diselesaikan	Kasus	0

1	2	3	4	5
28	3.32.000027	Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota	Laporan / Dokumen	2
29	3.32.000028	Ketersedian sarpras di lokasi penempatan	Unit	1
30	3.32.000029	Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina	Kepala Keluarga	1
31	3.32.000030	Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	8
32	3.32.000031	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan	Orang	1
33	3.32.000032	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan	Kepala Keluarga	1
34	3.32.000033	Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	1
35	3.32.000034	Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan.	Orang	2
36	3.32.000035	Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri	Kepala Keluarga	1
37	3.32.000036	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi	Kepala Keluarga	1
38	3.32.000037	Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM	Kepala Keluarga	0
39	3.32.000038	Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri	Kepala Keluarga	0
40	3.32.000039	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	2
41	3.32.000040	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	1
42	3.32.000041	Lokasi yang diusulkan	Kawasan	1
43	3.32.000042	Lokasi kawasan yang memiliki potensi	Kawasan	1
44	3.32.000043	Lokasi penempatan	Lokasi	1
45	3.32.000044	lokasi yang di usulkan	Lokasi	1
46	3.32.000045	Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Lokasi	0
47	3.32.000046	Luas tanah	Hektar	2
48	3.32.000047	Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasi	Hektar	2
49	3.32.000048	Luasan tanah utk pembangunan kawasan	Hektar	2
50	3.32.000049	Data Permasalahan yg belum, sedang, dan sudah diselesaikan	Kasus	0
51	3.32.000050	Satuan Permukiman yang dikembangkan	SP	1
52	3.32.000051	sertifikasi tanah	Sertifikat	0
53	3.32.000052	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	1
54	3.32.000053	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	1
55	3.32.000054	Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan	Kepala Keluarga	1

1	2	3	4	5
56	3.32.000055	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	1
57	3.32.000056	transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	2
58	3.32.000057	Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar	Paket	0
59	3.32.000058	transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan	Paket	1
60	3.32.000059	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	1

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.04.000001	Anggota Fasilitator	Orang	1
2	1.04.000002	Anggota Tim Pendamping	Orang	1
3	1.04.000003	Anggota Tim Satgas	Orang	12
4	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	89947
5	1.04.000005	Backlog Kepenghunian Rumah	Unit Rumah	0
6	1.04.000006	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	22
7	1.04.000007	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	10
8	1.04.000008	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	0
9	1.04.000009	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	0
10	1.04.000014	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
11	1.04.000016	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
12	1.04.000018	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	22
13	1.04.000020	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
14	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	1
15	1.04.000024	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2
16	1.04.000031	Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen	0

1	2	3	4	5
17	1.04.000034	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	0
18	1.04.000035	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	41
19	1.04.000037	Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus	Dokumen	0
20	1.04.000038	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Dokumen	0
21	1.04.000040	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0
22	1.04.000042	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0
23	1.04.000044	Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan	Dokumen	41
24	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	2
25	1.04.000046	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Kelompok	5
26	1.04.000049	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	0
27	1.04.000050	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Dokumen	0
28	1.04.000051	Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0
29	1.04.000052	Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
30	1.04.000053	Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
31	1.04.000054	Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
32	1.04.000055	Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0

1	2	3	4	5
33	1.04.000056	Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
34	1.04.000057	Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0
35	1.04.000058	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0
36	1.04.000059	Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0
37	1.04.000060	Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0
38	1.04.000061	Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0
39	1.04.000063	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	0
40	1.04.000065	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1
41	1.04.000066	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan	0
42	1.04.000067	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1
43	1.04.000069	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian	Laporan	0
44	1.04.000070	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	1
45	1.04.000071	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1

1	2	3	4	5
46	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1
47	1.04.000078	Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	37
48	1.04.000081	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	1
49	1.04.000082	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	Laporan	0
50	1.04.000083	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	1
51	1.04.000085	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	0
52	1.04.000089	Laporan pelaksanaan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Laporan	0
53	1.04.000090	Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	0
54	1.04.000091	Laporan pelaksanaan pertemuan/koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Laporan	0
55	1.04.000092	Laporan pelaksanaan pertemuan/rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0
56	1.04.000094	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	1
57	1.04.000096	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Laporan	0
58	1.04.000097	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program	Laporan	0
59	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	0
60	1.04.000105	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	0

1	2	3	4	5
61	1.04.000106	Laporan Pembinaan P3SRS	Laporan	0
62	1.04.000108	Laporan Pembinaan UPT Rumah Susun	Laporan	0
63	1.04.000110	Laporan proses penyediaan PSU perumahan	Laporan	1
64	1.04.000111	Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Laporan	1
65	1.04.000113	lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	Lokasi	28
66	1.04.000114	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	Lokasi	28
67	1.04.000115	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1
68	1.04.000116	Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	0
69	1.04.000118	Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0
70	1.04.000119	Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0
71	1.04.000120	Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0
72	1.04.000124	Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Ha	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
73	1.04.000126	Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ha	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
74	1.04.000133	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	0
75	1.04.000134	Pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana	Orang	0
76	1.04.000135	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali	Orang	0
77	1.04.000136	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa	Orang	0
78	1.04.000137	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah	Orang	22
79	1.04.000138	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi	Orang	0
80	1.04.000140	Pengelola Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibina	P3SRS	0

1	2	3	4	5
81	1.04.000141	Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan	Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan	49
82	1.04.000143	Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)	Dokumen	0
83	1.04.000144	Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	0
84	1.04.000146	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
85	1.04.000148	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama	Jenis dan Unit (PSU)	0
86	1.04.000151	Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan	Dokumen	0
87	1.04.000154	Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	Unit Rumah	22
88	1.04.000159	Rumah Khusus	Unit Rumah	0
89	1.04.000160	Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang Terbangun	Unit Rumah	0
90	1.04.000162	Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0
91	1.04.000164	Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	0
92	1.04.000165	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya	Unit Rumah	22
93	1.04.000166	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	29707
94	1.04.000167	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	14713
95	1.04.000168	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	0
96	1.04.000173	Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
97	1.04.000175	Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
98	1.04.000177	Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
99	1.04.000179	Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	0
100	1.04.000181	rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik	Unit Rumah	0
101	1.04.000182	Rumah Sewa Milik Masyarakat	Unit Rumah	0

1	2	3	4	5
102	1.04.000183	Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	0
103	1.04.000190	Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	0
104	1.04.000193	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan	Unit Rumah	0
105	1.04.000194	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
106	1.04.000196	Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
107	1.04.000198	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
108	1.04.000200	Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana	Unit Rumah	0
109	1.04.000201	Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
110	1.04.000204	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fungsi Hunian yang Diterbitkan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
111	1.04.000206	Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan	Dokumen	37
112	1.04.000211	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rumah Susun yang Diterbitkan	Dokumen	0
113	1.04.000212	UPT Rumah Susun yang dikelola	UPT	0
114	1.04.000216	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	0
115	1.04.000217	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	0
116	1.04.000218	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	0
117	1.04.000219	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	0

1	2	3	4	5
118	1.04.000227	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	0
119	1.04.000229	Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dokumen	42
120	1.04.000232	Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	0
121	1.04.000233	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	0
122	1.04.000234	Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen	0
123	1.04.000235	Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	87947
124	1.04.000236	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	1
125	1.04.000237	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitasi	Dokumen	49
126	1.04.000238	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	882
127	1.04.000240	Jumlah Laporan Fasilitasi Terhadap Pengawasan dalam Pelaksanaan Penjualan Rumah	Laporan	0
128	1.04.000242	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	1
129	1.04.000243	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Lokasi	0
130	1.04.000246	Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi	0
131	1.04.000248	Jumlah orang yang terfasilitasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	0

1	2	3	4	5
132	1.04.000251	Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	0
133	1.04.000254	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Orang	0
134	1.04.000256	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Orang	0
135	1.04.000258	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
136	1.04.000259	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	0
137	1.04.000261	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok	37
138	1.04.000262	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh	Rumah Tangga	0
139	1.04.000263	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	0
140	1.04.000264	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	0
141	1.04.000268	Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di permukiman	Unit	
142	1.04.000269	Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan	Unit	0
143	1.04.000271	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	882
144	1.04.000272	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	0

1	2	3	4	5
145	1.04.000273	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	88
146	1.04.000274	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi	Unit	88
147	1.04.000275	Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya	Unit	1266
148	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	0
149	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
150	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	0
151	1.04.000279	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	882
152	1.04.000280	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	29707
153	1.04.000281	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	1994
154	1.04.000285	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	0
155	1.04.000286	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	189
156	1.04.000289	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	0
157	1.04.000290	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	0
158	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	0
159	1.04.000296	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Laporan	0

1	2	3	4	5
160	1.04.000298	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0
161	1.04.000301	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Laporan	0
162	1.04.000302	Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	0
163	1.04.000303	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Program Kabupaten/Kota	Laporan	0
164	1.04.000305	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	0
165	1.04.000307	Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh	Laporan	0
166	1.04.000308	Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh	Laporan	0
167	1.04.000309	Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh	Laporan	0
168	1.04.000310	Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1
169	1.04.000313	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali	Ha	0
170	1.04.000314	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh	Ha	17.72
171	1.04.000315	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar	Ha	6.70
172	1.04.000317	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	0
173	1.04.000318	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	0
174	1.04.000320	Rumah pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	0

1	2	3	4	5
175	1.04.000322	Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	0
176	1.04.000323	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	642
177	1.04.000324	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	191

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Pertanahan

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.10.000001	Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	Dokumen	1
2	2.10.000002	Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian	Berita Acara	1
3	2.10.000003	Berita Acara kesepakatan desain konsolidasi tanah	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTAR U)
4	2.10.000004	Berita Acara kesepakatan rencana aksi	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTAR U)
5	2.10.000006	Berita Acara pelepasan hak atas tanah/ garapan dalam rangka konsolidasi tanah	Berita Acara	1
6	2.10.000007	Berita Acara penerapan desain konsolidasi tanah	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTAR U)
7	2.10.000008	Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis	Berita Acara	1
8	2.10.000009	Berita Acara penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTAR U)
9	2.10.000012	Daftar Nominatif	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTAR U)
10	2.10.000013	Daftar peniaian Objek Konsolidasi Tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
11	2.10.000014	Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	Dokumen	1
12	2.10.000015	Data aset tanah pemerintah	Dokumen	1
13	2.10.000016	Data fisik Objek Pengadaan Tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
14	2.10.000017	Data hasil penanganan permasalahan hukum pertanahan	Dokumen	0
15	2.10.000018	Data imeum mukim/keuchik yang mengikuti kegiatan pembinaan pertanahan	Dokumen	0
16	2.10.000019	Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1

1	2	3	4	5
17	2.10.000022	Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1
18	2.10.000023	Data inventarisasi tanah absente	Dokumen	0
19	2.10.000024	Data inventarisasi tanah kelebihan maksimum	Dokumen	0
20	2.10.000026	Data inventarisasi tanah kosong	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
21	2.10.000027	Data masyarakat hukum adat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
22	2.10.000028	Data Pemetaan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
23	2.10.000029	Data penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir	Dokumen	0
24	2.10.000030	Data pengukuran	Dokumen	0
25	2.10.000031	Data sempadan pantai yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	0
26	2.10.000032	Data sengketa, konflik dan perkara	Dokumen	1
27	2.10.000033	Data spasial (peta) batas tanah ulayat	Dokumen	0
28	2.10.000034	Data tanah milik masyarakat miskin	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
29	2.10.000035	Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	1
30	2.10.000036	Data wilayah pulau terpencil yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	0
31	2.10.000037	Data yuridis Objek Pengadaan Tanah	Dokumen	1
32	2.10.000038	Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Dokumen	0
33	2.10.000040	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1
34	2.10.000041	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah	Dokumen	0
35	2.10.000042	Dokumen kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN	Dokumen	0
36	2.10.000043	Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan	Dokumen	1

1	2	3	4	5
37	2.10.000044	Dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	Dokumen	1
38	2.10.000045	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
39	2.10.000046	Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah absente	Dokumen	0
40	2.10.000047	Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum	Dokumen	0
41	2.10.000049	Dokumen pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pertanahan	Dokumen	0
42	2.10.000050	Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pertanahan kasultanan dan kadipaten	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
43	2.10.000051	Dokumen pelaksanaan survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah	Dokumen	1
44	2.10.000052	Dokumen pemanfaatan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	
45	2.10.000053	Dokumen pembinaan kerjasama pendidikan pertanahan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
46	2.10.000054	Dokumen pemeliharaan Dokumen pertanahan	Dokumen	0
47	2.10.000055	Dokumen penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
48	2.10.000056	Dokumen pencatatan dalam daftar tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
49	2.10.000057	Dokumen pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
50	2.10.000059	Dokumen peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	1
51	2.10.000060	Dokumen perencanaan konsolidasi tanah	Dokumen	0
52	2.10.000062	Dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
53	2.10.000063	Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
54	2.10.000064	Dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)

1	2	3	4	5
55	2.10.000065	Dokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahan	Dokumen	1
56	2.10.000066	Dokumen sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Dokumen	0
57	2.10.000067	Dokumen survei dan pengukuran tana hak milik masyarakat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
58	2.10.000068	Dokumen survei dan pengukuran tanah HGU/HGB	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
59	2.10.000070	Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah	Dokumen	0
60	2.10.000071	Keputusan penegasan tanah objek konsolidasi tanah	Dokumen	0
61	2.10.000072	Laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	Laporan	0
62	2.10.000073	Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
63	2.10.000074	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan	Dokumen	0
64	2.10.000075	Laporan survei batas tanah ulayat	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
65	2.10.000076	layanan bantuan hukum perkara pertanahan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
66	2.10.000077	Lembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
67	2.10.000078	Nomor identifikasi bidang tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
68	2.10.000080	Penetapan nilai oleh tim Penilai	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
69	2.10.000081	Perda tentang RTRW Provinsi	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
70	2.10.000082	Peta Bidang Tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
71	2.10.000083	Peta desain konsolidasi tanah	Dokumen	0
72	2.10.000084	Peta lokasi HGU/HGB	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
73	2.10.000085	Peta lokasi tanah hak milik masyarakat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)

1	2	3	4	5
74	2.10.000086	Rencana aksi	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
75	2.10.000088	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
76	2.10.000089	Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah)	Dokumen	1
77	2.10.000091	Surat tanda bukti hak atas tanah	Surat	0
78	2.10.000098	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
79	2.10.000103	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
80	2.10.000105	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
81	2.10.000116	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
82	2.10.000118	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
83	2.10.000120	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
84	2.10.000142	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
85	2.10.000144	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
86	2.10.000145	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
87	2.10.000148	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)

1	2	3	4	5
88	2.10.000149	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
89	2.10.000150	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
90	2.10.000152	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
91	2.10.000153	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Sertifikat	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
92	2.10.000154	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
93	2.10.000155	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen	1
94	2.10.000156	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
95	2.10.000157	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
96	2.10.000158	Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara	1
97	2.10.000159	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	0
98	2.10.000160	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)

1	2	3	4	5
99	2.10.000161	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
100	2.10.000162	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
101	2.10.000163	Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
102	2.10.000164	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
103	2.10.000165	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
104	2.10.000166	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
105	2.10.000167	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
106	2.10.000168	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
107	2.10.000169	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen	1
108	2.10.000170	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan	0
109	2.10.000171	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	1
110	2.10.000172	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
111	2.10.000173	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
112	2.10.000174	Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
113	2.10.000175	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)

1	2	3	4	5
114	2.10.000179	Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	1
115	2.10.000180	Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	1
116	2.10.000198	Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
117	2.10.000199	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
118	2.10.000201	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen	0
119	2.10.000202	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen	0
120	2.10.000203	Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen	1
121	2.10.000206	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen	0
122	2.10.000208	Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan	0
123	2.10.000209	Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1
124	2.10.000210	Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	0
125	2.10.000211	Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	0

1	2	3	4	5
126	2.10.000212	Dana Kerohiman merupakan dana santunan yang diberikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dalam rangka pembangunan di atas Tanah Musnah. Dana dimaksud diberikan apabila adanya Rekonstruksi atau reklamasi yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain diatas tanah musnah dimaksud.	Laporan	0
127	2.10.000214	Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
128	2.10.000215	Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	1
129	2.10.000216	Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1
130	2.10.000217	Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1
131	2.10.000218	Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.08.000001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan	N/A
2	2.08.000002	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	N/A
3	2.08.000003	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0
4	2.08.000005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	0
5	2.08.000006	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	0
6	2.08.000008	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Dokumen	0
7	2.08.000009	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
8	2.08.000011	Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	Dokumen	0
9	2.08.000012	Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0
10	2.08.000013	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	Dokumen	1
11	2.08.000015	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0
12	2.08.000017	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kegiatan	2
13	2.08.000018	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan	3
14	2.08.000019	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	1
15	2.08.000021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	2
16	2.08.000023	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	2

1	2	3	4	5
17	2.08.000024	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	1
18	2.08.000025	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	0
19	2.08.000026	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	0
20	2.08.000028	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	Layanan	1
21	2.08.000029	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	1
22	2.08.000031	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan	1
23	2.08.000032	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	0
24	2.08.000034	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	5
25	2.08.000036	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota	Organisasi	30
26	2.08.000038	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	Organisasi	4
27	2.08.000039	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	4
28	2.08.000041	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga	Kegiatan	2
29	2.08.000042	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	4
30	2.08.000043	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	0
31	2.08.000044	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kegiatan	3
32	2.08.000045	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	26

1	2	3	4	5
33	2.08.000047	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Perangkat Daerah	10
34	2.08.000048	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	0
35	2.08.000049	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	26
36	2.08.000051	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	0
37	2.08.000054	perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	Orang	43
38	2.08.000055	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	50
39	2.08.000057	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	40
40	2.08.000059	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	40
41	2.08.000061	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan	4

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.14.000001	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	2
2	2.14.000002	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang / Sertifikat	0
3	2.14.000003	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	0
4	2.14.000013	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	4
5	2.14.000014	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi	Laporan	2
6	2.14.000015	Data Keluarga yang tercatat dan dilaporkan	Laporan	12
7	2.14.000017	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	0
8	2.14.000018	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	Laporan	12
9	2.14.000019	Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1
10	2.14.000022	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	0
11	2.14.000024	Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	0
12	2.14.000025	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	12
13	2.14.000026	Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun	Laporan	0
14	2.14.000028	Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	0
15	2.14.000029	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	0
16	2.14.000034	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	2259

1	2	3	4	5
17	2.14.000035	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	0
18	2.14.000036	kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	60
19	2.14.000037	Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	0
20	2.14.000038	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Kampung	54
21	2.14.000040	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	1
22	2.14.000042	Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan	Dokumen	0
23	2.14.000044	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	7
24	2.14.000045	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	7
25	2.14.000047	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	11
26	2.14.000048	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	0
27	2.14.000049	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1
28	2.14.000050	Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	0
29	2.14.000051	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	3

1	2	3	4	5
30	2.14.000052	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	2
31	2.14.000053	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	150
32	2.14.000054	Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan	Laporan / Sertifikat	0
33	2.14.000056	Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan	Dokumen	0
34	2.14.000057	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	1
35	2.14.000058	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	1
36	2.14.000061	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana	Kegiatan	10
37	2.14.000063	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	Organisasi	10
38	2.14.000064	Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Laporan	0
39	2.14.000065	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola	Laporan	12
40	2.14.000066	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	44
41	2.14.000067	orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang / Sertifikat	4303
42	2.14.000068	Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	0

1	2	3	4	5
43	2.14.000069	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	0
44	2.14.000070	Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	0
45	2.14.000071	orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang / Sertifikat	0
46	2.14.000072	Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan	0
47	2.14.000073	Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2
48	2.14.000074	Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	0
49	2.14.000075	Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	12
50	2.14.000077	Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sertifikat / Kegiatan	12
51	2.14.000078	Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Organisasi	0
52	2.14.000081	Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan	Dokumen	0
53	2.14.000086	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan	1
54	2.14.000087	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	2
55	2.14.000089	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	0

1	2	3	4	5
56	2.14.000090	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	0
57	2.14.000091	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kegiatan	0
58	2.14.000094	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kegiatan	1
59	2.14.000095	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	1
60	2.14.000100	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	10
61	2.14.000104	Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan	Sertifikat	0
62	2.14.000105	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan	40
63	2.14.000107	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	Kegiatan	10
64	2.14.000108	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk	Laporan / Dokumen	0
65	2.14.000109	Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan	Dokumen	2
66	2.14.000110	Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia	Laporan	1
67	2.14.000112	Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan	Kegiatan	0
68	2.14.000113	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kegiatan	2
69	2.14.000116	Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kegiatan	0
70	2.14.000117	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang / Sertifikat	84
71	2.14.000118	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	30
72	2.14.000119	Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia	Unit	20

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	1
2	2.16.000122	Prosedur penanganan komunikasi krisis	SOP	1
3	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	14.297
4	2.16.000125	Konten Teks	Konten	14.163
5	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	14.737
6	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	14.287
7	2.16.000128	Konten Audio	Konten	6.935
8	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	1
9	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	16
10	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	1
11	2.16.000132	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	1
12	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	14.603
13	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	2
14	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	1.017.684
15	2.16.000136	Media cetak yang dikelola Pemda	Media	12
16	2.16.000138	Saluran TV yang dikelola pemda	Saluran	0
17	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	1
18	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	2
19	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		122
20	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	5
21	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	5
22	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	112
23	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	29
24	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	856
25	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	330
26	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	216
27	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	6
28	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	5
29	2.16.000154	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan	1
30	2.16.000155	Pengaturan relasi media	Perda/ Perkada	1
31	2.16.000158	Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah	48

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Statistik

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	15
2	2.20.000020	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		15
3	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		15
4	2.20.000022	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	14
5	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	70
6	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	1
7	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	10
8	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	10
9	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	50
10	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	48
11	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	2

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Persandian

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	1
2	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	1
3	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	35
4	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	46
5	2.21.000009	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	1
6	2.21.000010	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Laporan	1
7	2.21.000011	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik	Laporan	1
8	2.21.000012	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	1

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.11.000001	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	NA
2	2.11.000004	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	68.4
3	2.11.000005	Data contoh uji	Data	16
4	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	NA
5	2.11.000007	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS	Laporan	4
6	2.11.000009	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	4
7	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	2
8	2.11.000011	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	2
9	2.11.000012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	1
10	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	NA
11	2.11.000014	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	NA
12	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	7
13	2.11.000018	data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	NA
14	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	2
15	2.11.000020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	2
16	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	16
17	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	2
18	2.11.000023	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1
19	2.11.000024	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	NA
20	2.11.000026	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	NA
21	2.11.000028	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	1
22	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	NA
23	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
24	2.11.000033	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dokumen	NA
25	2.11.000034	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	NA
26	2.11.000036	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	43
27	2.11.000037	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dokumen	5
28	2.11.000039	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	64
29	2.11.000041	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	1
30	2.11.000042	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	1
31	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	NA
32	2.11.000044	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	55
33	2.11.000046	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	5
34	2.11.000048	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	13
35	2.11.000049	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	43
36	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	1
37	2.11.000051	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	56
38	2.11.000052	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	56
39	2.11.000056	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	56
40	2.11.000058	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	56
41	2.11.000060	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses	Izin/persetujuan	NA
42	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	1

1	2	3	4	5
43	2.11.000063	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	NA
44	2.11.000066	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Kegiatan	NA
45	2.11.000067	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	NA
46	2.11.000068	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	2
47	2.11.000069	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	5
48	2.11.000070	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	5
49	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	5
50	2.11.000072	Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH	Kelompok	NA
51	2.11.000074	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok	NA
52	2.11.000075	Keluarga yang diidentifikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	NA
53	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	NA
54	2.11.000078	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	1
55	2.11.000080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	1
56	2.11.000081	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	4
57	2.11.000083	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
58	2.11.000084	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1
59	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	NA
60	2.11.000090	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1
61	2.11.000092	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Laporan	NA
62	2.11.000093	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	NA
63	2.11.000094	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	NA
64	2.11.000095	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	1
65	2.11.000096	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Dokumen	NA
66	2.11.000097	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan	Dokumen	NA
67	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
68	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1
69	2.11.000100	Laporan hasil Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
70	2.11.000102	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	1
71	2.11.000104	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Laporan	21
72	2.11.000105	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	1
73	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	NA
74	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	6
75	2.11.000108	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting	Lembaga	12
76	2.11.000110	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Lokasi	4
77	2.11.000111	Lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	NA
78	2.11.000112	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Lokasi	NA
79	2.11.000113	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi	NA
80	2.11.000114	Lokasi Proklamasi yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	17
81	2.11.000116	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	NA
82	2.11.000118	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	298.836
83	2.11.000120	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	NA
84	2.11.000122	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	32,8886
85	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	NA
86	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	40
87	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	40

1	2	3	4	5
88	2.11.000127	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Materi	NA
89	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	50.74
90	2.11.000129	Nilai IKAL n-1	Poin	0
91	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	64.9
92	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	43.1
93	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	89.84
94	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	40
95	2.11.000135	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	13
96	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	NA
97	2.11.000139	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	21
98	2.11.000140	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	21
99	2.11.000141	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	21
100	2.11.000142	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	NA
101	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	56
102	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	56
103	2.11.000146	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	6
104	2.11.000147	PPLHD Eksisting	Orang	6
105	2.11.000148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	NA
106	2.11.000149	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	NA
107	2.11.000150	Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Rekomendasi	NA

1	2	3	4	5
108	2.11.000151	Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	21
109	2.11.000152	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	21
110	2.11.000153	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	9
111	2.11.000155	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	1
112	2.11.000156	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Unit	11
113	2.11.000158	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	16
114	2.11.000159	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Unit	14
115	2.11.000160	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	60
116	2.11.000161	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	NA
117	2.11.000163	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	NA
118	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	8
119	2.11.000167	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Unit	247
120	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	2
121	2.11.000172	Volume timbulan sampah yang diangkut	Ton	217301,2 2
122	2.11.000174	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	46530.96
123	2.11.000175	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	NA
124	2.11.000176	Volume timbulan sampah yang diolah	Ton	36595.22
125	2.11.000177	Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA	Ton	69350
126	2.11.000179	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst	Dokumen	NA
127	2.11.000181	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara	Unit	5

1	2	3	4	5
128	2.11.000183	Jumlah data contoh uji	Data	16
129	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	1
130	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	NA
131	2.11.000189	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun	Dokumen	25
132	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	1
133	2.11.000192	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	Unit	NA
134	2.11.000193	Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Usaha	21
135	2.11.000195	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	13
136	2.11.000197	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	56
137	2.11.000198	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	56
138	2.11.000200	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	56
139	2.11.000201	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	56
140	2.11.000205	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Perkara	NA
141	2.11.000207	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	NA
142	2.11.000208	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	NA
143	2.11.000209	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kegiatan	NA
144	2.11.000211	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	2

1	2	3	4	5
145	2.11.000213	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	NA
146	2.11.000215	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	NA
147	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	4
148	2.11.000218	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	1
149	2.11.000220	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	2
150	2.11.000221	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	NA
151	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
152	2.11.000225	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Dokumen	1
153	2.11.000226	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Dokumen	NA
154	2.11.000227	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Dokumen	NA
155	2.11.000230	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
156	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
157	2.11.000232	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota	Dokumen	1
158	2.11.000234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	1
159	2.11.000236	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dokumen	1
160	2.11.000238	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	8

1	2	3	4	5
161	2.11.000241	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Lokasi	7
162	2.11.000243	Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi	Lokasi	NA
163	2.11.000244	Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	NA
164	2.11.000245	Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi	Lokasi	NA
165	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	40
166	2.11.000247	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	2
167	2.11.000250	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	13
168	2.11.000251	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	6
169	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	6
170	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	NA
171	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	9
172	2.11.000255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	NA
173	2.11.000256	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Ton	NA
174	2.11.000257	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Unit	1
175	2.11.000259	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi	Unit	36
176	2.11.000260	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia	Unit	NA
177	2.11.000261	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	NA
178	2.11.000262	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	NA
179	2.11.000263	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	NA

1	2	3	4	5
180	2.11.000264	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	NA
181	2.11.000265	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	NA
182	2.11.000266	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	13
183	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	12
184	2.11.000269	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Dokumen	1
185	2.11.000271	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	MÂ²	8550
186	2.11.000273	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	2
187	2.11.000275	Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	NA
188	2.11.000277	Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	NA
189	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	68.4
190	2.11.000280	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	Rumah tangga : 31,47% , pasar 24,5 % , fasilitas publik 17,2%, perkantoran 6,7%, pusat perniagaan 8,3%, kawasan 10,7%, lain-lain 0,
191	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	1
192	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	1
193	2.11.000283	Tersusunnya dokumen SLHD	Dokumen	1
194	2.11.000286	Volume sampah yang didaur ulang	Ton	20204.08
195	2.11.000287	Volume sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	8.64

1	2	3	4	5
196	2.11.000288	Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	69350
197	2.11.000289	Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	36595.22
198	2.11.000290	Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	NA
199	2.11.000292	Jumlah laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		NA

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Pangan

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.09.000021	Jenis pangan lokal	Laporan	1
2	2.09.000030	Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	1
3	2.09.000053	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1
4	2.09.000063	Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas	Dokumen	N/A (pendataan pangan lokal hanya untuk produksi)
5	2.09.000068	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	N/A (skor pola pangan harapan dihitung hanya pada tahun berjalan)
6	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	1
7	2.09.000078	Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen	Dokumen	1
8	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	1
9	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	1
10	2.09.000082	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
11	2.09.000083	Data Produksi Pangan	Dokumen	1
12	2.09.000084	Data Stok Pangan	Dokumen	1
13	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	N/A (kewenangan Diskumindag)
14	2.09.000087	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	Laporan	N/A (pengumpulan data hanya untuk padi, jagung, sapi hidup, telur, ayam ras)
15	2.09.000097	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1
16	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	N/A (Hanya ada dokumen pembinaan/so sialisasi pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan)
17	2.09.000101	Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun	Dokumen	11

1	2	3	4	5
18	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	1
19	2.09.000103	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	1
20	2.09.000105	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
21	2.09.000109	Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun	Dokumen	N/A (belum ada PSAT PDUK label hijau yang terbit)
22	2.09.000113	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
23	2.09.000114	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	40
24	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	1
25	2.09.000118	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)	Laporan	1
26	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	1
27	2.09.000120	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Laporan	N/A (kewenangan Diskumindag)
28	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	1
29	2.09.000134	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
30	2.09.000135	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A (bukan kewenangan DKP3)
31	2.09.000137	Jumlah Usaha Pangan Lokal	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
32	2.09.000138	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
33	2.09.000139	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
34	2.09.000142	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	N/A (pendataan hanya produksi pangan lokal)
35	2.09.000143	Data harga minimum pangan pokok lokal	Dokumen	N/A (pendataan hanya produksi pangan lokal)
36	2.09.000144	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2
37	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	1
38	2.09.000149	Indeks Ketahanan Pangan Level Desa	Dokumen	N/A (bukan kewenangan kabupaten)
39	2.09.000152	Data Penerima Manfaat	Dokumen	N/A (bukan kewenangan kabupaten)
40	2.09.000153	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	N/A (tidak ada kegiatan intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi)
41	2.09.000155	Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun	Dokumen	8
42	2.09.000159	Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
43	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	Dari 174 sampel dilakukan 4 macam uji yaitu uji logam berat (Arsen dan Kadmium), uji formalin, uji residu pestisida dan hasilnya 78% MS, 22% TMS
44	2.09.000190	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota	Dokumen	1

1	2	3	4	5
45	2.09.000210	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Unit	N/A (koordinasi dan sinkronisasi hanya dengan gapoktan)
46	2.09.000211	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	1
47	2.09.000212	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	1
48	2.09.000213	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	5.25
49	2.09.000214	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
50	2.09.000215	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
51	2.09.000216	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	5.25
52	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	1
53	2.09.000219	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.25.000006	Benih ikan	Paket	10
2	3.25.000007	dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	1734
3	3.25.000010	Data pengendalian residu	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
4	3.25.000012	Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	4
5	3.25.000013	Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1
6	3.25.000020	Data pengendalian lingkungan budidaya	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
7	3.25.000021	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
8	3.25.000023	Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10
9	3.25.000027	Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	1
10	3.25.000028	Data rehabilitasi lingkungan budidaya	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
11	3.25.000032	Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
12	3.25.000036	Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	1

1	2	3	4	5
13	3.25.000044	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	16
14	3.25.000045	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	16
15	3.25.000046	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	36
16	3.25.000047	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	36
17	3.25.000050	Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1
18	3.25.000051	Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1
19	3.25.000058	Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	1
20	3.25.000063	Hasil tangkapan yang di daratkan	Ton	2648.9
21	3.25.000064	Hasil tangkapan yang dilelang	Ton	N/A (tidak ada hasil tangkapan yang dilelang melainkan langsung dijual)
22	3.25.000065	Ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	386.9
23	3.25.000066	Ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	812 ton
24	3.25.000072	Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	1
25	3.25.000076	Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	1
26	3.25.000079	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	16

1	2	3	4	5
27	3.25.000080	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	16
28	3.25.000081	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	36
29	3.25.000082	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	36
30	3.25.000085	Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	1
31	3.25.000093	Jumlah alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit	N/A (tidak menggunakan kapal angkut, hasil panen diangkut langsung oleh bakul/pengepul ikan)
32	3.25.000098	kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	512
33	3.25.000109	kelompok nelayan kecil	Kelompok	904
34	3.25.000110	kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan	Nelayan/ KUB/Koperasi	N/A (tidak diketahui secara pasti/ tidak ada data)
35	3.25.000112	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	121
36	3.25.000113	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan	Kelompok	N/A (tidak diketahui secara pasti/ tidak ada data)
37	3.25.000114	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas	Kelompok	7
38	3.25.000115	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	Kelompok	121
39	3.25.000116	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK	Kelompok	N/A (tidak diketahui secara pasti/ tidak ada data)

1	2	3	4	5
40	3.25.000117	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	7
41	3.25.000118	kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya	Kelompok	N/A (tidak diketahui secara pasti/ tidak ada data)
42	3.25.000119	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	KUB	27
43	3.25.000121	Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan)	Koperasi	N/A (tidak ada koperasi perikanan tangkap)
44	3.25.000123	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	N/A (Pengujian kualitas air BBI hanya dilakukan 2 tahun sekali, terakhir pengujian pada tahun 2022)
45	3.25.000127	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	Ha	15.21
46	3.25.000133	Nelayan kecil	Orang	904
47	3.25.000134	Obat Ikan	Unit	N/A (tidak ada data yang menerangkan jumlah obat ikan yang digunakan oleh Pembudidaya ikan)
48	3.25.000136	Pakan Ikan	Unit	1
49	3.25.000139	Panjang saluran air	Meter	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
50	3.25.000143	Pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan	Pelabuhan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
51	3.25.000144	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil	Kegiatan	N/A (Tahun 2023 tidak ada kegiatan pelatihan untuk nelayan kecil)

1	2	3	4	5
52	3.25.000146	Pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	16
53	3.25.000147	Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	36
54	3.25.000148	Pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	Pelaku Usaha	0
55	3.25.000149	Pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	Pelaku Usaha	11
56	3.25.000154	Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	7
57	3.25.000161	Permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
58	3.25.000164	Permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
59	3.25.000165	Permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
60	3.25.000176	Permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
61	3.25.000177	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diProses	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
62	3.25.000178	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
63	3.25.000179	Permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
64	3.25.000180	Permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
65	3.25.000182	Permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
66	3.25.000183	Permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
67	3.25.000186	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
68	3.25.000187	Persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
69	3.25.000188	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
70	3.25.000189	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
71	3.25.000207	Pupuk ikan	Paket	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
72	3.25.000208	Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	Rekomen dasi	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
73	3.25.000212	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
74	3.25.000215	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan	Rekomen dasi	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
75	3.25.000216	Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
76	3.25.000217	Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
77	3.25.000218	Rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)

1	2	3	4	5
78	3.25.000219	Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
79	3.25.000226	sampel yang diuji	Sampel	Uji kualitas air kolam Balai Benih Ikan 2 tahun sekali (1 sampel setiap 2 tahun)
80	3.25.000227	Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	N/A (belum pernah dilakukan)
81	3.25.000229	SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
82	3.25.000233	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara	TPI	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
83	3.25.000238	unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
84	3.25.000241	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	4
85	3.25.000242	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha	Unit Usaha	4
86	3.25.000245	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	4
87	3.25.000246	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	Unit Usaha	4
88	3.25.000258	wadah pembudidayaan ikan	Unit	2
89	3.25.000391	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil	Kegiatan	26
90	3.25.000401	Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Hari Operasi	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
91	3.25.000402	Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
92	3.25.000403	Sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Perkara	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
93	3.25.000404	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
94	3.25.000406	Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
95	3.25.000407	Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
96	3.25.000408	Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	Perkara	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
97	3.25.000409	Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
98	3.25.000410	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
99	3.25.000411	Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
100	3.25.000423	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi Pada Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	Lokasi	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
101	3.25.000424	pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	316

1	2	3	4	5
102	3.25.000425	Kasus Pelanggaran Usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	Perkara	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
103	3.25.000426	Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Perkara	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
104	3.25.000427	Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
105	3.25.004115	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
106	3.25.004116	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
107	3.25.004117	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan	Pelaku Usaha	N/A (bukan kewenangan DKP3)
108	3.25.004118	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha	N/A (bukan kewenangan DKP3)
109	3.25.004119	Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
110	3.25.004120	Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
111	3.25.004121	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
112	3.25.004122	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
113	3.25.004123	SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)

1	2	3	4	5
114	3.25.004127	Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
115	3.25.004128	SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
116	3.25.004129	Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
117	3.25.004130	Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil	Unit	N/A (Tidak ada perahu penangkapan 5 GT keatas di perairan umum kabupaten sragen)
118	3.25.004131	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran	Unit	413
119	3.25.004132	Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	1734
120	3.25.004133	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	1055
121	3.25.004134	Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	950
122	3.25.004135	Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	105

1	2	3	4	5
123	3.25.004136	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
124	3.25.004137	Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
125	3.25.004165	Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
126	3.25.004166	SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
127	3.25.004167	Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
128	3.25.004168	Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Rekomen dasi	N/A (bukan kewenangan DKP3)
129	3.25.004174	Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Uji kualitas air kolam Balai Benih Ikan 2 tahun sekali (1 sampel setiap 2 tahun)

1	2	3	4	5
130	3.25.004175	Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
131	3.25.004176	Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
132	3.25.004177	Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
133	3.25.004189	Pos kesehatan ikan terpadu	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
134	3.25.004190	Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Kelompok	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Pertanian

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.27.000051	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
2	3.27.000135	Panjang Jalan Usaha Tani eksisting	KM	
3	3.27.000137	Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara	KM	
4	3.27.000143	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	N/A (tidak ada alokasi anggaran untuk pengiriman uji sampel)
5	3.27.000152	pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Laporan	1
6	3.27.000222	Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan	Sertifikat	N/A (tidak ada data, hanya ada sertifikat benih tanaman pangan)
7	3.27.000238	Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	1
8	3.27.000239	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	1
9	3.27.000240	Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis	Laporan	1
10	3.27.000241	Jumlah analisis Risiko produk hewan	Laporan	1
11	3.27.000242	Jumlah analisis Risiko zoonosis	Laporan	1
12	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
13	3.27.000244	Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
14	3.27.000245	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun	Unit	0
15	3.27.000246	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi	Unit	2
16	3.27.000248	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
17	3.27.000249	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	Batang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
18	3.27.000250	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Batang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
19	3.27.000251	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
20	3.27.000252	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
21	3.27.000253	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
22	3.27.000254	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
23	3.27.000255	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya	Batang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
24	3.27.000256	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia	Batang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
25	3.27.000257	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia	Ton	7.511,725 (padi)
26	3.27.000258	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	N/A (kewenangan BPSB Provinsi Jawa Tengah)
27	3.27.000259	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Ton	N/A (kewenangan BPSB Provinsi Jawa Tengah)
28	3.27.000260	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Setek	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
29	3.27.000261	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Setek	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
30	3.27.000262	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia	Setek	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
31	3.27.000263	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
32	3.27.000264	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
33	3.27.000265	Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi	Anakan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
34	3.27.000266	Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakuka)
35	3.27.000267	Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi	Gram	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
36	3.27.000270	Jumlah Benih Ternak yang beredar	Dosis	48190
37	3.27.000271	Jumlah benih ternak yang bermutu	Dosis	53700
38	3.27.000272	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	Dosis	53700
39	3.27.000273	Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan	Dosis	48190
40	3.27.000274	Jumlah Benih Ternak yang tersedia	Dosis	53700
41	3.27.000275	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
42	3.27.000276	Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
43	3.27.000277	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
44	3.27.000278	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
45	3.27.000279	Jumlah bibit ternak yang bermutu	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
46	3.27.000280	Jumlah bibit ternak yang bersertifikat	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
47	3.27.000281	Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
48	3.27.000282	Jumlah Bibit Ternak yang tersedia	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
49	3.27.000283	Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3
50	3.27.000284	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
51	3.27.000285	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
52	3.27.000286	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
53	3.27.000287	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	20
54	3.27.000289	Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi	Unit	0
55	3.27.000290	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
56	3.27.000291	Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan/ternak akibat bencana alam	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
57	3.27.000292	Jumlah Eksisting Bahan Pakan yang diproduksi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
58	3.27.000293	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	20
59	3.27.000294	Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
60	3.27.000295	Jumlah eksisting DAM Parit	Unit	13
61	3.27.000296	Jumlah Eksisting Embung Pertanian	Unit	21
62	3.27.000297	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian	Unit	1
63	3.27.000298	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	37
64	3.27.000299	Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	N/A (tidak ada laboratorium)
65	3.27.000300	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	N/A (tidak ada laboratorium)
66	3.27.000301	Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan	Unit	N/A (tidak ada laboratorium)
67	3.27.000302	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota	Unit	20
68	3.27.000303	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
69	3.27.000304	Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar	Dosis	300
70	3.27.000305	Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi	Laporan	1
71	3.27.000306	Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan	Kasus	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
72	3.27.000307	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	129
73	3.27.000308	Jumlah Eksisting Pintu Air	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
74	3.27.000309	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan	Unit	2
75	3.27.000310	Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya	Unit	1
76	3.27.000311	Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya	Unit	3
77	3.27.000312	Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya	Unit	6
78	3.27.000313	Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya	Unit	334
79	3.27.000314	Jumlah Eksisting Puskesmas	Unit	2
80	3.27.000316	Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun	Unit	15
81	3.27.000317	Jumlah Eksisting Sarana Pendukung	Unit	21
82	3.27.000318	Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
83	3.27.000319	Jumlah Eksisting UPTD BIB	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
84	3.27.000320	Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak	Unit	1
85	3.27.000321	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
86	3.27.000322	Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Unit	0
87	3.27.000324	Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi	Unit	0
88	3.27.000325	Jumlah Eksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi)	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
89	3.27.000326	Jumlah Eksisting Laboratorium Pertanian	Unit	0
90	3.27.000327	Jumlah Eksisting Rumah Potong Hewan	Unit	2
91	3.27.000328	Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Galur	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
92	3.27.000329	Jumlah galur yang dimanfaatkan	Galur	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
93	3.27.000330	Jumlah galur yang dinilai	Galur	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
94	3.27.000331	Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya	Galur	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
95	3.27.000332	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun	Unit	0
96	3.27.000333	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi	Unit	0
97	3.27.000335	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Laporan	1
98	3.27.000336	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	1
99	3.27.000337	Jumlah hewan yang berhasil ditangani	Ekor	1
100	3.27.000338	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
101	3.27.000339	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang dibutuhkan	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
102	3.27.000340	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
103	3.27.000341	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
104	3.27.000342	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
105	3.27.000343	Jumlah HPT yang beredar	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
106	3.27.000344	Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi	Unit	2
107	3.27.000345	Jumlah izin laboratorium yang diawasi	Laporan	N/A (tidak ada laboratorium)
108	3.27.000347	Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	1
109	3.27.000348	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	1
110	3.27.000349	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
111	3.27.000350	Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi	Laporan	5
112	3.27.000351	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	Laporan	4
113	3.27.000352	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
114	3.27.000353	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	
115	3.27.000354	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
116	3.27.000355	Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi	Laporan	1
117	3.27.000356	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	1
118	3.27.000357	Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner	Laporan	15
119	3.27.000358	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola	Unit	0
120	3.27.000359	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	Unit	37
121	3.27.000361	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Unit	0
122	3.27.000362	Jumlah kader zoonosis	Orang	N/A (belum ada pembentukan kader zoonosis)
123	3.27.000363	Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan	Kasus	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
124	3.27.000364	Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani	Kasus	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
125	3.27.000365	Jumlah kasus penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan	Kasus	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
126	3.27.000366	Jumlah kasus zoonosis	Kasus	0
127	3.27.000367	Jumlah kasus zoonosis pada hewan	Kasus	0
128	3.27.000368	Jumlah kasus zoonosis pada manusia	Kasus	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
129	3.27.000369	Jumlah Kebutuhan Benih	Ton	
130	3.27.000370	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
131	3.27.000371	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Unit	8
132	3.27.000372	Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	
133	3.27.000373	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
134	3.27.000375	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	
135	3.27.000376	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	1
136	3.27.000377	Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi	Kasus	0

1	2	3	4	5
137	3.27.000378	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	0
138	3.27.000379	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	24
139	3.27.000380	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
140	3.27.000381	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	20
141	3.27.000382	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	205
142	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	20
143	3.27.000384	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	2641
144	3.27.000385	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	
145	3.27.000386	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
146	3.27.000387	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
147	3.27.000388	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	8
148	3.27.000389	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	3
149	3.27.000390	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	
150	3.27.000391	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	
151	3.27.000392	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
152	3.27.000393	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
153	3.27.000394	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	10
154	3.27.000395	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	2
155	3.27.000396	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	

1	2	3	4	5
156	3.27.000397	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	
157	3.27.000398	Jumlah Ketersediaan Pestisida	Liter	N/A (tidak ada data/ survei yang dilakukan)
158	3.27.000399	Jumlah ketersediaan pupuk	Ton	
159	3.27.000400	Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian	Unit	
160	3.27.000401	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Unit	0
161	3.27.000402	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	0
162	3.27.000403	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan	
163	3.27.000404	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	1
164	3.27.000405	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1
165	3.27.000406	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
166	3.27.000407	Jumlah Korporasi Petani	Unit	1
167	3.27.000408	Jumlah Laboratorium	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
168	3.27.000409	Jumlah Laboratorium Benih atau Balai Benih yang dibangun	Unit	
169	3.27.000410	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	Unit	
170	3.27.000411	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun	Unit	0
171	3.27.000413	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun	Unit	0
172	3.27.000414	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara	Unit	0
173	3.27.000415	Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional	Kasus	0
174	3.27.000416	Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
175	3.27.000417	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Unit	1317
176	3.27.000418	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura	Ha	10

1	2	3	4	5
177	3.27.000419	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan	Ha	0
178	3.27.000420	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	Ha	1968
179	3.27.000421	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi	Ha	10
180	3.27.000422	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi	Ha	0
181	3.27.000423	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi	Ha	1968
182	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	0
183	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	Ha	0
184	3.27.000426	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Ha	0
185	3.27.000427	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani	Ha	0
186	3.27.000428	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	3229
187	3.27.000429	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	3229
188	3.27.000430	Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi	Ha	0
189	3.27.000431	Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan	Ha	0
190	3.27.000432	Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola	Ha	0
191	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	14
192	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	14
193	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	10
194	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	10
195	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	4015
196	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	4015
197	3.27.000439	Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan	Ha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
198	3.27.000440	Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan	Ha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
199	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
200	3.27.000442	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	0
201	3.27.000443	Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	1
202	3.27.000444	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Dokumen	N/A (tidak ada pabrik obat hewan)
203	3.27.000445	Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	1
204	3.27.000446	Jumlah pascapanen perkebunan	Unit	4
205	3.27.000447	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	N/A (tidak ada data)
206	3.27.000448	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	N/A (tidak ada laboratorium)
207	3.27.000449	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1
208	3.27.000450	Jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	N/A (tidak ada laboratorium)
209	3.27.000451	Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
210	3.27.000452	Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	N/A (tidak ada laboratorium)
211	3.27.000453	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
212	3.27.000454	Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
213	3.27.000455	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
214	3.27.000456	Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
215	3.27.000458	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
216	3.27.000459	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
217	3.27.000460	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Dokumen	1

1	2	3	4	5
218	3.27.000461	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Dokumen	1
219	3.27.000462	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	1
220	3.27.000463	Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	1
221	3.27.000464	Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Dosis	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
222	3.27.000465	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
223	3.27.000466	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
224	3.27.000467	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	1
225	3.27.000468	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
226	3.27.000469	Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
227	3.27.000470	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
228	3.27.000471	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
229	3.27.000472	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
230	3.27.000473	Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
231	3.27.000474	Jumlah penggunaan alsintan	Unit	
232	3.27.000475	Jumlah penggunaan pestisida	Liter	N/A (tidak ada data/ survei yang dilakukan)
233	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	
234	3.27.000477	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Unit	0
235	3.27.000478	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
236	3.27.000479	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
237	3.27.000480	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Unit	8
238	3.27.000481	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	4
239	3.27.000482	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	4
240	3.27.000483	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	
241	3.27.000484	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	
242	3.27.000485	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	
243	3.27.000486	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya	Unit	
244	3.27.000487	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	0
245	3.27.000488	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
246	3.27.000489	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
247	3.27.000490	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Unit	8
248	3.27.000491	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	4
249	3.27.000492	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	4
250	3.27.000493	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	
251	3.27.000494	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	
252	3.27.000495	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	
253	3.27.000496	Jumlah pengolahan hasil perkebunan	Unit	12
254	3.27.000497	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	2021
255	3.27.000498	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kasus	N/A (bukan kewenangan kabupaten)

1	2	3	4	5
256	3.27.000499	Jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kasus	N/A (bukan kewenangan kabupaten)
257	3.27.000500	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	3
258	3.27.000501	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	0
259	3.27.000502	Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	N/A (tidak ada laboratorium)
260	3.27.000503	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	N/A (bukan kewenangan kabupaten)
261	3.27.000504	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)	Ton	7.511,725 ton (Padi)
262	3.27.000505	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain)	Setek	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
263	3.27.000506	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	7
264	3.27.000507	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
265	3.27.000508	Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	1
266	3.27.000509	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	1
267	3.27.000510	Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	1
268	3.27.000511	Jumlah Pintu Air direhabilitasi	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
269	3.27.000513	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
270	3.27.000514	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
271	3.27.000515	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
272	3.27.000516	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
273	3.27.000517	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
274	3.27.000518	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
275	3.27.000519	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
276	3.27.000520	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun	Unit	0
277	3.27.000521	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi	Unit	0
278	3.27.000522	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara	Unit	0
279	3.27.000523	Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura	Unit	0
280	3.27.000524	Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan	Unit	12
281	3.27.000525	Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
282	3.27.000526	Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan	Unit	
283	3.27.000527	Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura	Unit	0
284	3.27.000528	Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan	Unit	0
285	3.27.000529	Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
286	3.27.000531	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	0
287	3.27.000532	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan	Unit	12
288	3.27.000533	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	
289	3.27.000534	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian	Unit	
290	3.27.000535	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun	Unit	0
291	3.27.000536	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	0
292	3.27.000538	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun	Unit	0

1	2	3	4	5
293	3.27.000539	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	1
294	3.27.000541	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun	Unit	
295	3.27.000542	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	
296	3.27.000544	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Produk	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
297	3.27.000546	Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan	Ton	364795
298	3.27.000547	Jumlah Produksi Benih Ternak	Dosis	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
299	3.27.000548	Jumlah Produksi Bibit Ternak	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
300	3.27.000549	Jumlah Produksi HPT	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
301	3.27.000550	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	0
302	3.27.000551	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	Unit	0
303	3.27.000553	Jumlah rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	N/A (tidak ada laboratorium)
304	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomen dasi	5
305	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomen dasi	1
306	3.27.000556	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
307	3.27.000557	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
308	3.27.000558	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
309	3.27.000559	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
310	3.27.000560	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
311	3.27.000561	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
312	3.27.000564	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun	Unit	1
313	3.27.000565	Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi	Unit	1

1	2	3	4	5
314	3.27.000567	Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun	Unit	1
315	3.27.000568	Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi	Unit	1
316	3.27.000569	Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Rumpun	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
317	3.27.000570	Jumlah rumpun yang dimanfaatkan	Rumpun	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
318	3.27.000571	Jumlah rumpun yang dinilai	Rumpun	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
319	3.27.000572	Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya	Rumpun	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
320	3.27.000573	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
321	3.27.000574	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
322	3.27.000575	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
323	3.27.000576	Jumlah Sarana Pendukung dibangun	Unit	
324	3.27.000577	Jumlah Sarana Pendukung direhabilitas	Unit	
325	3.27.000579	Jumlah sarana penyuluhan pertanian	Unit	0
326	3.27.000580	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1
327	3.27.000581	Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan	Varietas Unggul Baru (VUB)	1
328	3.27.000582	Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya	Varietas Unggul Baru (VUB)	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
329	3.27.000583	Jumlah Sebaran Alsintan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
330	3.27.000584	Jumlah Sebaran Pestisida	Liter	N/A (tidak ada data/ survei yang dilakukan)
331	3.27.000585	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	
332	3.27.000586	Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian	Unit	
333	3.27.000587	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	0
334	3.27.000588	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
335	3.27.000589	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	2
336	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	1556
337	3.27.000591	Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1
338	3.27.000593	Jumlah Unit pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
339	3.27.000599	Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis	Wilayah	7
340	3.27.000601	Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
341	3.27.000602	Jumlah wilayah terkendali Zoonosis	Wilayah	7
342	3.27.000603	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	7
343	3.27.000604	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi	Unit	N/A (bukan kewenangan kabupaten)
344	3.27.000605	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	0
345	3.27.000606	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	0
346	3.27.000607	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	0
347	3.27.000608	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	0
348	3.27.000609	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	0

1	2	3	4	5
349	3.27.000610	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	0
350	3.27.000611	Luas kawasan hortikultura	Ha	1410
351	3.27.000612	Luas kawasan perkebunan	Ha	13087,26
352	3.27.000613	Luas kawasan peternakan	Ha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
353	3.27.000614	Luas kawasan tanaman pangan	Ha	47233
354	3.27.000615	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	N/A (Kewenangan Disperkimtaru)
355	3.27.000616	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
356	3.27.000617	Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	N/A (Kewenangan Disperkimtaru)
357	3.27.000618	Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
358	3.27.000619	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	N/A (Kewenangan Disperkimtaru)
359	3.27.000620	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
360	3.27.000624	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
361	3.27.000625	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
362	3.27.000626	Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian	Dokumen	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
363	3.27.000632	Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Dosis	53700
364	3.27.000636	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Laporan	1
365	3.27.000637	Jumlah unit usaha pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik	Unit Usaha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)

1	2	3	4	5
366	3.27.000638	Jumlah unit usaha budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara budidaya ternak yang baik	Unit Usaha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
367	3.27.000641	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
368	3.27.000649	Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Laporan	0

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.05.000001	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	400
2	1.05.000006	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analisis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	0
3	1.05.000007	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analisis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	0
4	1.05.000008	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	8
5	1.05.000009	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	8
6	1.05.000013	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1
7	1.05.000014	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	NA
8	1.05.000015	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	NA
9	1.05.000016	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	
10	1.05.000017	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	0
11	1.05.000018	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	3
12	1.05.000023	Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	NA
13	1.05.000030	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	

1	2	3	4	5
14	1.05.000031	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	
15	1.05.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
16	1.05.000033	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
17	1.05.000034	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	
18	1.05.000035	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	
19	1.05.000036	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	
20	1.05.000042	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	
21	1.05.000052	Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	
22	1.05.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	
23	1.05.000054	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	
24	1.05.000056	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
25	1.05.000058	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1
26	1.05.000059	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	

1	2	3	4	5
27	1.05.000060	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	
28	1.05.000063	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1
29	1.05.000064	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1
30	1.05.000065	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1
31	1.05.000066	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	0
32	1.05.000070	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen	NA
33	1.05.000071	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	NA
34	1.05.000077	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	NA
35	1.05.000080	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	NA
36	1.05.000081	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	NA
37	1.05.000082	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	NA
38	1.05.000088	Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2
39	1.05.000089	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	10
40	1.05.000090	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	10
41	1.05.000091	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	NA
42	1.05.000092	Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Dokumen	0

1	2	3	4	5
43	1.05.000093	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0
44	1.05.000094	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	0
45	1.05.000098	Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	0
46	1.05.000099	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1
47	1.05.000100	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	
48	1.05.000101	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	NA
49	1.05.000102	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	
50	1.05.000103	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	
51	1.05.000108	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1
52	1.05.000110	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	
53	1.05.000111	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	
54	1.05.000112	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Kasus	
55	1.05.000113	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Kasus	

1	2	3	4	5
56	1.05.000114	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Kasus	
57	1.05.000115	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Kasus	
58	1.05.000116	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Kasus	
59	1.05.000117	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawasan	Kasus	
60	1.05.000118	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Kasus	
61	1.05.000119	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	NA
62	1.05.000120	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	NA
63	1.05.000121	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	NA
64	1.05.000122	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	
65	1.05.000123	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	90
66	1.05.000124	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	90
67	1.05.000125	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	54555
68	1.05.000126	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	54555
69	1.05.000127	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	54555
70	1.05.000133	Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	NA
71	1.05.000137	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh	Laporan	
72	1.05.000138	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	
73	1.05.000141	Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan	
74	1.05.000144	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Informasi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	

1	2	3	4	5
75	1.05.000145	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	
76	1.05.000146	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	
77	1.05.000147	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	
78	1.05.000148	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	
79	1.05.000149	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
80	1.05.000150	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Qanun Syariat Islam	Laporan	
81	1.05.000152	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
82	1.05.000153	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
83	1.05.000154	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
84	1.05.000155	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
85	1.05.000156	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
86	1.05.000157	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
87	1.05.000158	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
88	1.05.000159	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
89	1.05.000160	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
90	1.05.000161	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
91	1.05.000162	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	

1	2	3	4	5
92	1.05.000163	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
93	1.05.000164	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
94	1.05.000165	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
95	1.05.000166	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong	Laporan	
96	1.05.000167	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim	Laporan	
97	1.05.000172	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	
98	1.05.000173	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	
99	1.05.000174	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi Qanun Syariat Islam	Laporan	
100	1.05.000178	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan	
101	1.05.000181	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	
102	1.05.000182	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	
103	1.05.000183	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Qanun	Laporan	
104	1.05.000187	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	

1	2	3	4	5
105	1.05.000188	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	
106	1.05.000189	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	
107	1.05.000190	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Qanun	Laporan	
108	1.05.000193	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	
109	1.05.000194	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	
110	1.05.000196	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	
111	1.05.000197	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	
112	1.05.000202	Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	
113	1.05.000203	Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	NA
114	1.05.000204	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Laporan	
115	1.05.000205	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Laporan	
116	1.05.000208	Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	NA
117	1.05.000213	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Laporan	
118	1.05.000214	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	
119	1.05.000215	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	200

1	2	3	4	5
120	1.05.000216	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	493
121	1.05.000219	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara	Unit	1
122	1.05.000220	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga	Unit	1
123	1.05.000221	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Unit	1
124	1.05.000224	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	40
125	1.05.000225	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	40
126	1.05.000227	Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	
127	1.05.000229	Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	
128	1.05.000232	Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	
129	1.05.000233	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	
130	1.05.000236	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	
131	1.05.000237	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	
132	1.05.000239	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	
133	1.05.000240	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	
134	1.05.000241	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	
135	1.05.000242	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
136	1.05.000243	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu	Dokumen	2
137	1.05.000244	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	
138	1.05.000245	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	
139	1.05.000246	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	493
140	1.05.000247	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	493
141	1.05.000248	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	NA
142	1.05.000249	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	NA
143	1.05.000250	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	NA
144	1.05.000251	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	NA
145	1.05.000252	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
146	1.05.000253	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
147	1.05.000254	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	NA
148	1.05.000255	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	NA
149	1.05.000259	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	NA
150	1.05.000264	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	NA
151	1.05.000266	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	1
152	1.05.000267	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	
153	1.05.000268	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	1
154	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	1

1	2	3	4	5
155	1.05.000273	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	
156	1.05.000274	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
157	1.05.000275	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	
158	1.05.000276	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
159	1.05.000277	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	NA
160	1.05.000278	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	
161	1.05.000279	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
162	1.05.000280	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0
163	1.05.000282	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Laporan	
164	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	
165	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	
166	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	
167	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	
168	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
169	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	
170	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	
171	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	
172	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	

1	2	3	4	5
173	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0
174	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	NA

Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat

No.	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.05.000001	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	400
2	1.05.000006	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	0
3	1.05.000007	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	0
4	1.05.000008	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	8
5	1.05.000009	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	8
6	1.05.000013	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1
7	1.05.000014	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	NA
8	1.05.000015	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	NA
9	1.05.000016	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	
10	1.05.000017	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	0
11	1.05.000018	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	3
12	1.05.000023	Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	NA
13	1.05.000030	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	

1	2	3	4	5
14	1.05.000031	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	
15	1.05.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
16	1.05.000033	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
17	1.05.000034	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	
18	1.05.000035	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	
19	1.05.000036	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	
20	1.05.000042	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	
21	1.05.000052	Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	
22	1.05.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	
23	1.05.000054	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	
24	1.05.000056	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
25	1.05.000058	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1
26	1.05.000059	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	

1	2	3	4	5
27	1.05.000060	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	
28	1.05.000063	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1
29	1.05.000064	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1
30	1.05.000065	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1
31	1.05.000066	Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	0
32	1.05.000070	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen	NA
33	1.05.000071	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	NA
34	1.05.000077	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	NA
35	1.05.000080	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	NA
36	1.05.000081	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	NA
37	1.05.000082	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	NA
38	1.05.000088	Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2
39	1.05.000089	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	10
40	1.05.000090	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	10
41	1.05.000091	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	NA

1	2	3	4	5
42	1.05.000092	Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Dokumen	0
43	1.05.000093	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0
44	1.05.000094	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	0
45	1.05.000098	Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	0
46	1.05.000099	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1
47	1.05.000100	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	
48	1.05.000101	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	NA
49	1.05.000102	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	
50	1.05.000103	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	
51	1.05.000108	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1
52	1.05.000110	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	
53	1.05.000111	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	
54	1.05.000112	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Kasus	

1	2	3	4	5
55	1.05.000113	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Kasus	
56	1.05.000114	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Kasus	
57	1.05.000115	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Kasus	
58	1.05.000116	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Kasus	
59	1.05.000117	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawasan	Kasus	
60	1.05.000118	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Kasus	
61	1.05.000119	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	NA
62	1.05.000120	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	NA
63	1.05.000121	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	NA
64	1.05.000122	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	
65	1.05.000123	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	90
66	1.05.000124	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	90
67	1.05.000125	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	54555
68	1.05.000126	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	54555
69	1.05.000127	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	54555
70	1.05.000133	Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	NA
71	1.05.000137	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh	Laporan	
72	1.05.000138	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	
73	1.05.000141	Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan	

1	2	3	4	5
74	1.05.000144	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Informasi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	
75	1.05.000145	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	
76	1.05.000146	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	
77	1.05.000147	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	
78	1.05.000148	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	
79	1.05.000149	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
80	1.05.000150	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Qanun Syariat Islam	Laporan	
81	1.05.000152	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
82	1.05.000153	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
83	1.05.000154	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
84	1.05.000155	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
85	1.05.000156	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
86	1.05.000157	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
87	1.05.000158	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
88	1.05.000159	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
89	1.05.000160	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
90	1.05.000161	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	

1	2	3	4	5
91	1.05.000162	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
92	1.05.000163	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
93	1.05.000164	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	
94	1.05.000165	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	
95	1.05.000166	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong	Laporan	
96	1.05.000167	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim	Laporan	
97	1.05.000172	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	
98	1.05.000173	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	
99	1.05.000174	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi Qanun Syariat Islam	Laporan	
100	1.05.000178	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan	
101	1.05.000181	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	
102	1.05.000182	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	
103	1.05.000183	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Qanun	Laporan	
104	1.05.000187	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	

1	2	3	4	5
105	1.05.000188	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	
106	1.05.000189	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	
107	1.05.000190	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Qanun	Laporan	
108	1.05.000193	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	
109	1.05.000194	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	
110	1.05.000196	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	
111	1.05.000197	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	
112	1.05.000202	Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	
113	1.05.000203	Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	NA
114	1.05.000204	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Laporan	
115	1.05.000205	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Laporan	
116	1.05.000208	Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	NA
117	1.05.000213	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Laporan	
118	1.05.000214	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	
119	1.05.000215	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	200

1	2	3	4	5
120	1.05.000216	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	493
121	1.05.000219	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara	Unit	1
122	1.05.000220	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga	Unit	1
123	1.05.000221	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Unit	1
124	1.05.000224	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	40
125	1.05.000225	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	40
126	1.05.000227	Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	
127	1.05.000229	Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	
128	1.05.000232	Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	
129	1.05.000233	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	
130	1.05.000236	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	
131	1.05.000237	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	
132	1.05.000239	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	
133	1.05.000240	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	
134	1.05.000241	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	

1	2	3	4	5
135	1.05.000242	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	NA
136	1.05.000243	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu	Dokumen	2
137	1.05.000244	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	
138	1.05.000245	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	
139	1.05.000246	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	493
140	1.05.000247	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	493
141	1.05.000248	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	NA
142	1.05.000249	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	NA
143	1.05.000250	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	NA
144	1.05.000251	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	NA
145	1.05.000252	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
146	1.05.000253	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
147	1.05.000254	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	NA
148	1.05.000255	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	NA
149	1.05.000259	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	NA
150	1.05.000264	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	NA
151	1.05.000266	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	1

1	2	3	4	5
152	1.05.000267	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	
153	1.05.000268	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	1
154	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	1
155	1.05.000273	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	
156	1.05.000274	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
157	1.05.000275	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	
158	1.05.000276	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
159	1.05.000277	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	NA
160	1.05.000278	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	
161	1.05.000279	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
162	1.05.000280	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0
163	1.05.000282	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Laporan	
164	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	
165	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	
166	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	
167	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	
168	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
169	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	

1	2	3	4	5
170	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	
171	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	
172	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	
173	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0
174	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	NA

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI